



Bumi Bung Karno
Blitar
keren

LKJIP

2023



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA BLITAR**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas karunia dan kekuasaanya sehingga dapat menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar tahun 2023. Laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Blitar selama tahun 2023 dengan hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja ini adalah berkat kerja keras seluruh jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan di Kota Blitar dengan mengoptimalkan sumberdaya manusia dan anggaran yang ada.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sekaligus sebagai bahan perbaikan untuk kinerja yang lebih baik lagi di masa yang akan datang serta bahan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Blitar, Februari 2024
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Blitar



IKHTISAR RINGKASAN

Peraturan Walikota Blitar Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar, sebagai Organisasi Perangkat Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Blitar melalui Sekretaris Daerah dengan tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan trantibum serta perlindungan masyarakat sub-bidang/urusan penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar sendiri menjalankan fungsi di antaranya:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
3. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatan; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Visi Kota Blitar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 adalah: ***“Terwujudnya Kota Blitar Keren Unggul, Makmur dan Bermartabat”***.

Adapun Misi Kota Blitar Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan.
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter.
3. Berdikari secara Ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital.
4. Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan.

5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi.

Adapun tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar di dalam mewujudkan Visi dan Misi Kota Blitar ditujukan untuk mewujudkan Misi Keempat Kota Blitar: **Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan**, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

TUJUAN		SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR
Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan Terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menghadapi Bencana	Indeks Kapasitas Daerah
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Sebagai tindaklanjut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar menetapkan Rencana Kinerja Tahun 2023. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar dalam melakukan kinerjanya guna mencapai sasaran strategis selama tahun 2023.

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja sasaran strategis/kinerja utama yang didukung berbagai program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 dengan alokasi anggaran belanja sebesar **Rp. 4.620.880.694 (Empat miliar enam ratus dua puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah)**, yang penjabarannya tersaji pada tabel alokasi anggaran belanja dan realisasinya di bawah ini:

No.	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB- KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.541.282.961	1.512.262.372	98,12
1.1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	403.018.130	397.979.900	98,75
1.1.1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Bencana)	403.018.130	397.979.900	98,75
1.2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	581.217.520	574.213.047	98,79
1.2.1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	86.975.524	85.488.050	98,29
1.2.2	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	351.453.023	349.928.047	99,57
1.2.3	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	142.788.973	138.796.950	97,20
1.3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	361.957.653	346.633.525	95,77
1.3.1	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	361.957.653	346.633.525	95,77
1.4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	195.089.658	193.435.900	99,15
1.4.1	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan	195.089.658	193.435.900	99,15

	Bencana Kabupaten/Kota			
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.079.597.733	2.993.892.080	97,22
2.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.604.009	47.017625	94,79
2.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.234.028	7.191.975	87,34
2.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	41.369.981	39.825.650	96,27
2.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.844.362.632	1.789.108.750	97,00
2.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.839.489.092	1.784.272.650	97,00
2.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran	4.873.540	4.836.100	99,23
2.3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	163.354.000	162.531.200	99,50
2.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	96.684.075	96.258.500	99,56
2.3.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	66.669.925	66.272.700	99,40
2.4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	334.924.495	332.530.898	99,29
2.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.202.048	12.193.664	99,93
2.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.279.590	25.702.640	97,80
2.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.647.190	12.259.300	96,93
2.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.216.000	27.206.800	99,97

2.4.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.398.571	31.175.139	99,29
2.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000	4.260.000	78,89
2.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	219.781.096	219.733.355	99,98
2.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	249.154.897	247.512.000	99,34
2.5.1	Pengadaan Mebel	24.478.714	22.950.000	93,75
2.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	224.676.183	224.562.000	99,95
2.6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	240.493.500	224.506.599	93,35
2.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.693.500	29.152.317	84,03
2.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	205.800.000	195.354.282	94,92
2.7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	197.704.200	190.685.008	96,45
2.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	179.479.000	172.593.508	96,16
2.7.2	Pemeliharaan Mebel	6.503.500	6.499.000	99,93
2.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.721.700	11.592.500	98,90
JUMLAH		4.620.880.694	4.506.154.452	97,52

Selanjutnya realisasi dan capaian sasaran strategis dijabarkan melalui tabel sebagai berikut:

No	Sasaran		Target	Realisasi	Capaian	Ket
	Uraian	Indikator				
1	Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menghadapi Bencana	Indeks Kapasitas Daerah	0,55	0,43	78,18	Kategori Sedang
2	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	83,70	104,62	A (Memuaskan)

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2023 dapat dikatakan baik walaupun masih dijumpai adanya kendala/hambatan di dalam pelaksanaannya

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR RINGKASAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi	2
C. Maksud Dan Tujuan.....	8
D. Dasar Hukum	8
E. Aspek-Aspek Strategis	11
F. Isu-Isu Strategis	11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	14
A. Rencana Strategis 2021-2026.....	14
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA/SASARAN.....	19
1. Analisi Capaian Kinerja Berdasarkan Target Dan Realisasi Tahun 2023	20
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023.....	24
3. Perbandingan Realisasi Kinerja S.D Akhir Periode Renstra ..	27
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional (Target SPM).....	27
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN (COST PER OUTCOME)	71
1. Alokasi Belanja Per Sasaran Pembangunan	74
2. Pencapaian Kinerja Dan Anggaran	75
3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	77
BAB IV PENUTUP.....	80
A. KESIMPULAN.....	80
B. LANGKAH PERBAIKAN	81

LAMPIRAN

- A. Matrik Rencana Strategis OPD Tahun 2021-2026
- B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023
- C. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- D. Pengukuran Kinerja Tahun 2023

DAFTAR TABEL

Tabel 1.2 Aspek-Aspek Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2023	11
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Badan penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2023.....	15
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2023.....	17
Tabel 3.1 Capaian Kinerja / Sasaran Tahun 2023	19
Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023	24
Tabel 3.3 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Instansi sejenis	26
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra	27
Tabel 3.5 Target Pencapaian SPM	28
Tabel 3.6 Data Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman Bencana (Bahaya Gempa Bumi, Cuaca Ekstrem, dan Kebakaran Gedung-Pemukiman Kota Blitar Tahun 2023)	29
Tabel 3.7 Data Pelatihan Kebencanaan Bagi Warga di Kota Blitar Tahun 2023	34
Tabel 3.8 Data Pelatihan Aparatur Kebencanaan di Kota Blitar Tahun 2023	34
Tabel 3.9 Data Jumlah Korban Kebencanaan di Kota Blitar Tahun 2023	44
Tabel 3.10 Data Layanan Pusdalops di Kota Blitar Tahun 2023.....	45
Tabel 3.11 Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja.....	71

Tabel 3.12 Realisasi Anggaran untuk Setiap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2023	71
Tabel 3.13 Alokasi Anggaran Belanja Per Sasaran Pembangunan Tahun 2023	74
Tabel 3.14 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Belanja Tahun 2023.....	75
Tabel 3.15 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	77
Tabel 4.1 Rencana Tindaklanjut LKjIP	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar	4
Diagram 1.1.1 Jumlah Pegawai berdasarkan pangkat/golongan....	7
Diagram 1.1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan .	7
Diagram 1.1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pejabat Struktural/Fungsional.....	8

BAB I



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mekanisme evaluasi dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah menempatkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menjadi salah satu tolok ukur untuk melihat tingkat keberhasilan atau bahkan sebuah kegagalan terhadap program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Sebagaimana ditetapkan dalam Permen-PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap akhir tahun anggaran sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan selama satu tahun anggaran.

Di samping sebagai kewajiban, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada hakekatnya merupakan kebutuhan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan yang berkualitas, dalam arti mengalami peningkatan/penurunan, baik dari sisi pelaksanaan maupun hasil-hasilnya. Dapat dikatakan pula bahwa LKjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban konkret atas penyelenggaraan program dan kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2023 sendiri dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah. Di dalamnya, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (responsibilitas) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumber daya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar diharapkan

dapat menjadi:

1. Umpan balik bagi peningkatan kinerja;
2. Wahana untuk mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi;
3. Daya dorong (*supporting unit*) bagi OPD lain untuk menyelenggarakan tugas umum dan pembangunan daerah secara baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar, sebagai Organisasi Perangkat Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Blitar melalui Sekretaris Daerah dengan tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan trantibum serta perlindungan masyarakat sub-bidang/urusan penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar menjalankan fungsi sebagai berikut:

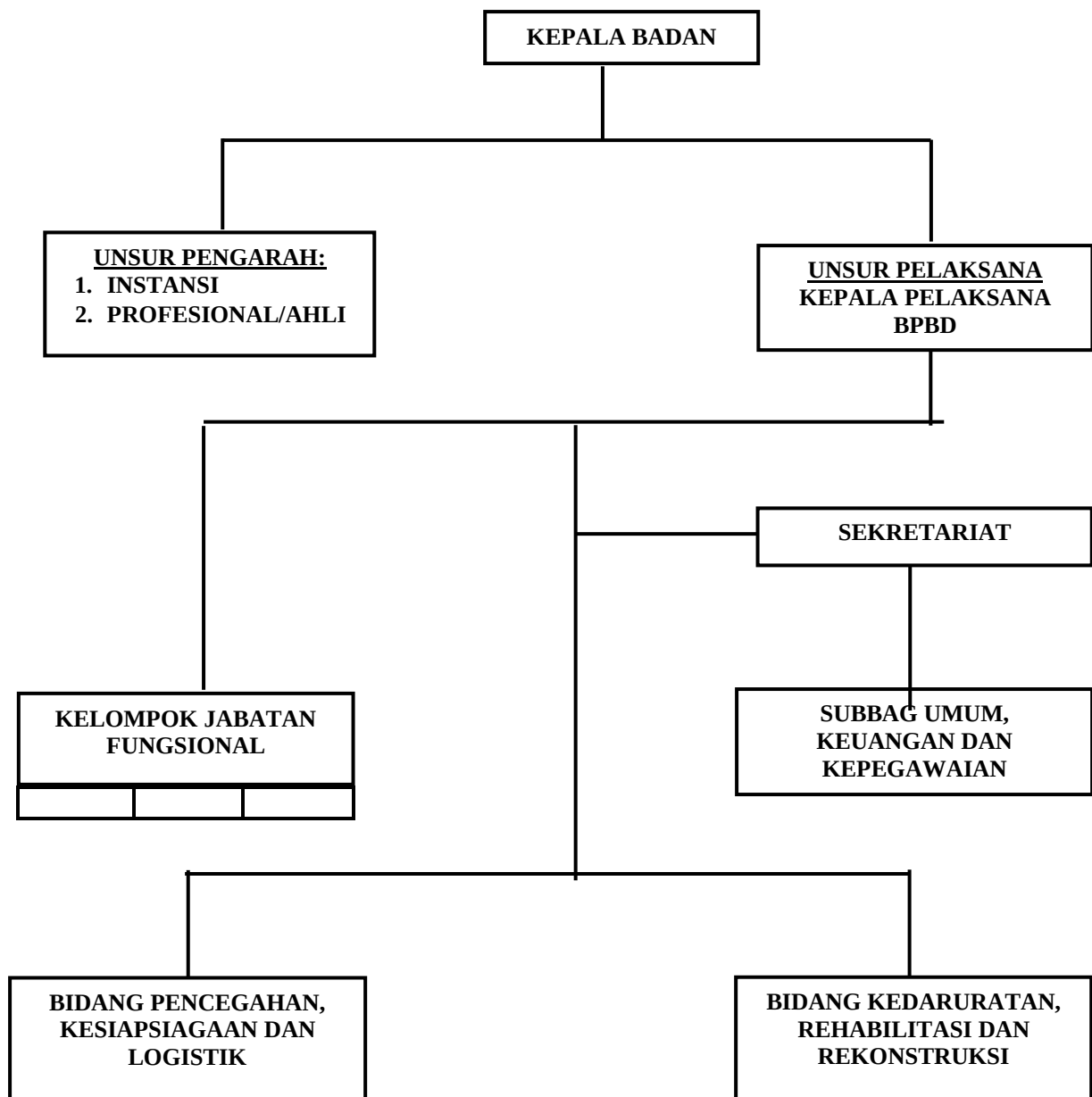
1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
3. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatan; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar juga menjalankan tugas atau kewenangan sebagai berikut:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Menetapkan prosedur penyelenggaraan pencegahan, kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
6. Menetapkan prosedur penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
7. Melaksanakan penataan sistem dasar penanggulangan bencana;
8. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
9. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
10. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
11. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar, terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat Badan, 2 (dua) Bidang, 1 (satu) Sub-Bagian, Unsur Pelaksana, dan Unsur Pengarah, sebagaimana diterangkan pada Gambar 1.1 sebagai berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar
 (Peraturan Walikota Blitar Nomor 14 Tahun 2022)



Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar, terdiri dari:

- Kepala Badan.
- Unsur Pelaksana (Kepala Pelaksana BPBD), membawahi:
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- Unsur Pengarah (Instansi dan Profesional/Ahli)
- Sekretariat Dinas, membawahi:

- Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian.
- Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Logistik.
- Bidang Kedaruratan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

SUMBER DAYA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BLITAR

1. Sumber Daya Manusia

Sesuai dengan struktur organisasi diatas, komposisi Pegawai Negeri Sipil pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar pada Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

a. Berdasarkan kualifikasi pendidikan :

- S3 berjumlah : - orang
- S2 berjumlah : 1 orang
- S1 berjumlah : 7 orang
- D3 berjumlah : 1 orang
- SLTA berjumlah : 4 orang
- SLTP berjumlah : 1 orang

b. Berdasarkan pangkat dan golongan sebagai berikut :

- Pembina Utama Muda (IV/c) : - orang
- Pembina Tk. I (IV/b) : 1 orang
- Pembina (IV/a) : 2 orang
- Penata Tk. I (III/d) : 4 orang
- Penata (III/c) : - orang
- Penata Muda Tk. I (III/b) : - orang
- Penata Muda (III/a) : 4 orang
- Pengatur Tk. I (II/d) : 2 orang
- Pengatur (II/c) : - orang
- Pengatur Muda Tk. I (II/b) : - orang
- Pengatur Muda (II/a) : 1 orang
- Juru Tk. I (I/d) : - orang
- Juru (I/c) : - orang
- Juru Muda Tk. I (I/b) : - orang
- Juru Muda (I/a) : - orang

c. Jabatan Struktural dan Fungsional yang terdapat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar terdiri dari :

- Eselon II/a : - orang
- Eselon II/b : 1 orang
- Eselon III/a : - orang
- Eselon III/b : 3 orang
- Eselon IV/a : 1 orang
- Fungsional : 2 orang

Penyetaraan

1 Berdasarkan jenis kelamin :

- Laki-laki : 9 orang
- Perempuan : 5 orang

2 Berdasarkan Diklat Struktural dan Fungsional :

- Diklat Pim IV : 7 orang
- Diklat Pim III : 3 orang
- Diklat Pim II : - orang
- Diklat : - orang

Fungsional

Sumber: *Data Tahun 2023*

Dukungan Personil Lainnya /THL :

PTT	1 Orang
THL (URC, Pusdalops, Agen Informasi Bencana, Keamanan, Kebersihan, Pelayanan Umum)	17 Orang

Diagram 1.1.1

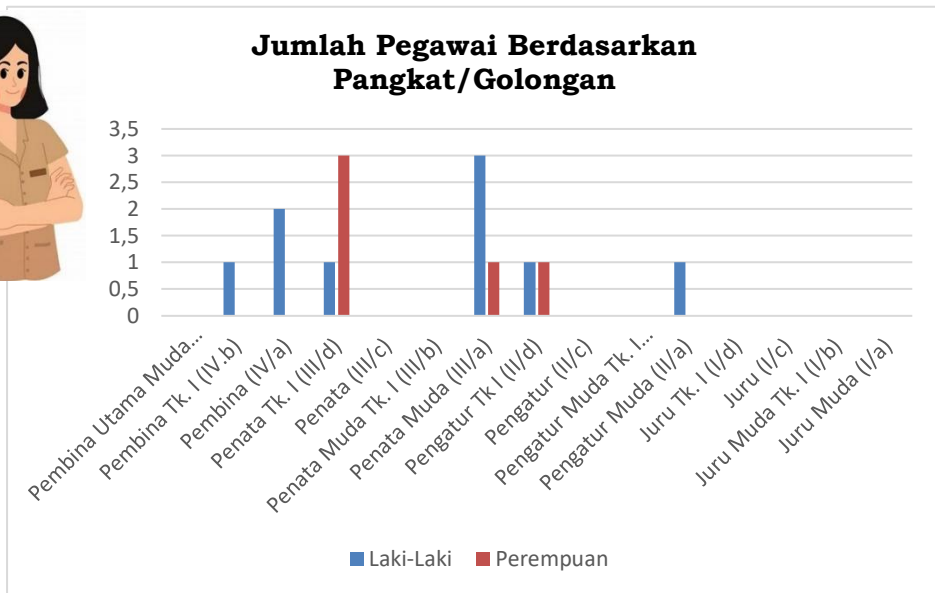


Diagram 1.1.2

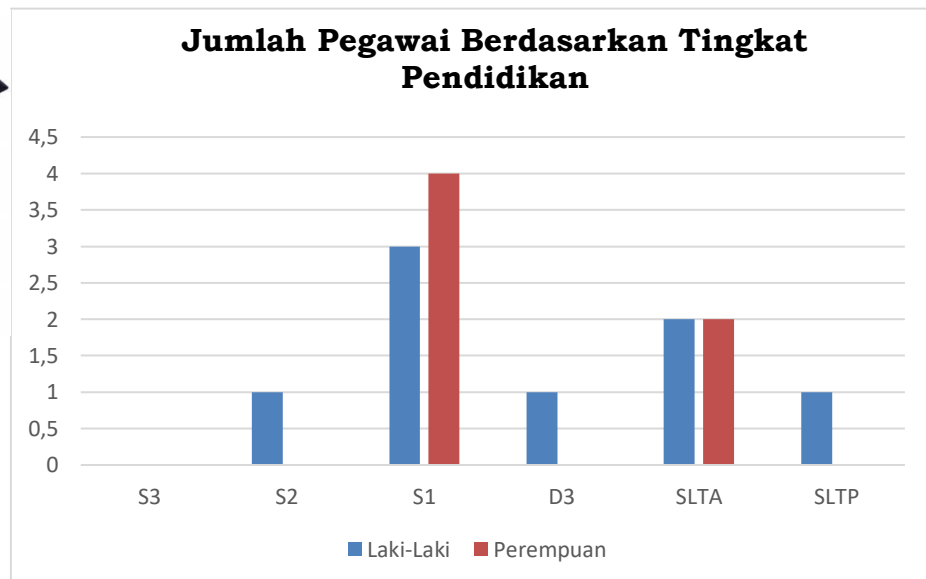
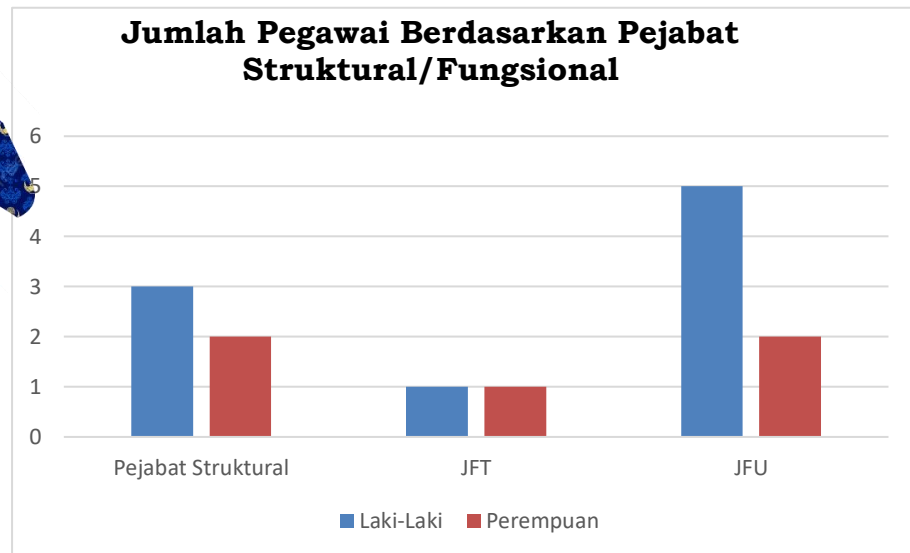




Diagram 1.1.3



C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKjIP ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar dan sarana untuk mengkomunikasikan serta menjawab apa yang telah ditargetkan dan sekaligus menggambarkan bagaimana proses pencapaiannya pada tahun 2023.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk memberikan informasi mengenai keberhasilan/kegagalan tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam pencapaian target sasaran tahun anggaran 2023 serta sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan perencanaan kegiatan pada tahun yang akan datang.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005 - 2025;
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2023;
17. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022 – 2026;
20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023;
21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023;
24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;

E. Aspek-aspek Strategis

Aspek-aspek strategis yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, meliputi:

Tabel 1.2
Aspek-aspek Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2023

Internal	Eksternal
(+) Kekuatan	(+) Peluang
1. Program kerja OPD yang tersusun 2. Telaksananya inventarisasi, pengolahan, penyajian dan pemeliharaan data 3. Tersedianya pengendalian, monitoring, dan evaluasi program 4. Laporan akuntabilitas yang tersusun	1. Landasan hukum penyelenggaraan penanganan bencana dari tingkat pusat hingga daerah 2. Semakin besarnya perhatian dari Pemerintah maupun masyarakat akan perlunya kesadaran dalam hal pengurangan resiko bencana 3. Mulai tingginya koordinasi dan Kerjasama antar pemangku kepentingan (<i>Stakeholders</i>)
(-) Kelemahan	(-) Ancaman
1. Kurangnya jumlah SDM dengan kompetensi yang memadai untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana 2. Kurang optimalnya koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	1. Kendala sosialisasi paradigma baru karena masih banyaknya masyarakat belum memahami pentingnya kegiatan penanggulangan bencana 2. Besarnya kebutuhan pengembangan kapasitas yang merupakan kemampuan internal organisasi dalam penanggulangan bencana 3. Perlunya alokasi anggaran yang ideal dalam mengatasi permasalahan penanggulangan bencana

F. Isu-isu Strategis

Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar dalam melaksanakan urusannya, permasalahan yang dihadapi dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Rendahnya kesadaran atau minimnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pencegahan dan penanggulangan bencana;
2. Minimnya sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana yang memadai dan sesuai dengan standar minimal BNPB;

3. Belum optimalnya perencanaan pembangunan yang berbasis pengurangan resiko bencana;
4. Belum optimalnya sosialisasi terhadap masyarakat maupun komunitas dunia usaha dalam rangka penanggulangan bencana; dan
5. Terbatasnya SDM kebencanaan yang memiliki kompetensi.

Adapun, isu-isu strategis yang terkait dengan kebencanaan di antaranya:

1. Belum adanya regulasi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana;
2. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan bencana yang memadai sesuai dengan standart minimal BNPB;
3. Mengedukasi masyarakat agar dapat berperan aktif dalam penanggulangan bencana dengan membentuk kelurahan dan kecamatan tangguh bencana;
4. Peningkatan kapasitas SDM, baik secara mandiri maupun dengan mengikuti program – program yang diselenggarakan oleh Pusat dan Pemerintah Propinsi;
5. Membangun sistem pelayanan informasi bencana yang terintegrasi pada setiap fase bencana;
6. Peningkatan fasilitas bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan korban terdampak;
7. Meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha melalui program CSR baik pada fase pra bencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana.
8. Peningkatan fungsi koordinatif BPBD Kota Blitar dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana untuk merangkul semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana, baik di internal pemerintah, maupun lembaga – lembaga terkait kebencanaan, swasta, dan masyarakat;



BAB II



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2021 – 2026

Rencana Strategis dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2023 secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, kondisi riil, potensi, hambatan, resiko serta pengembangan ke depan. Sehingga, tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar pada tahun 2023 dan seterusnya dapat mendukung perwujudan Visi dan Misi Kota Blitar.

Visi Kota Blitar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 adalah: ***“Terwujudnya Kota Blitar Keren Unggul, Makmur dan Bermartabat”***.

Adapun Misi Kota Blitar Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan.
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter.
3. Berdikari secara Ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital.
4. Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan.
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi.

Visi dan Misi Kota Blitar tersebut kemudian menghasilkan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2026. Erat kaitannya dengan pencapaian Visi dan Misi Kota Blitar tersebut, maka dokumen perencanaan strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar harus dapat mengintegrasikan kepentingan dari berbagai unsur dan komponen yang ada serta dapat diimplementasikan dalam Rencana Kerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar.

Adapun Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dan Tujuan, Sasaran serta Indikator Sasaran pada Misi Keempat Kota Blitar: **Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan**, dan berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar kemudian diuraikan dalam Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2023

RPJMD TAHUN 2021 – 2026 VISI : Terwujudnya Kota Blitar Keren, Unggul, Makmur dan Bermartabat MISI 4 : Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan TUJUAN : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup SASARAN : Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan terhadap Bencana	RENSTRA TAHUN 2021 – 2026 TUJUAN : 1. Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan terhadap Bencana 2. Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah INDIKATOR : 1. Indeks Ketahanan Daerah 2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah SASARAN : 1. Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menghadapi Bencana 2. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah INDIKATOR : 1. Indeks Kapasitas Daerah 2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah PROGRAM : 1. Program Penanggulangan Bencana 2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
--	---

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Rencana Kinerja Tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar adalah penjabaran dari sasaran strategis dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar dalam pelaksanaan kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran tahun 2023.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan Kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2023 diuraikan dalam Tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar
Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menghadapi Bencana	Indeks Kapasitas Daerah	0.55
2.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (80)

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1.	Program Penanggulangan Bencana	1.541.282.961	DAU
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.079.597.733	DAU
	J U M L A H	4.620.880.694	



BAB III



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah mempertanggungjawabkan keberhasilan /kegagalan pelaksanaan untuk Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan.

A. Pengukuran Capaian Kinerja /Sasaran

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program/kegiatan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sekaligus sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Blitar tahun 2023, dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Capaian indikator kinerja diperoleh dari perbandingan rencana dengan realisasi berdasarkan data-data pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana tersaji pada tabel 3.1 di bawah ini :

Tabel 3.1
CAPAIAN KINERJA SASARAN TAHUN 2023

KINERJA UTAMA/TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana	Indeks Kapasitas Daerah	0,55	0,43	78,18
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (80)	A (83,70)	104,62

1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023

A. Indeks Kapasitas Daerah

IKD merupakan instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. Dari IKD, setiap daerah mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan Langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan risiko. Berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 BPBD Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan kegiatan pengukuran IKD dengan metodologi pengukuran untuk Kapasitas Provinsi Jawa Timur adalah agregat dari kapasitas OPD/Instansi/Lembaga Kabupaten Kota (C1) dan kapasitas Provinsi OPD/Instansi/Lembaga Provinsi Jawa Timur (C2)

$$\text{Kapasitas Jawa Timur} = (60\% \times C1) + (40\% \times C2)$$

Dari 284 pertanyaan yang mewakili 71 indikator ketangguhan daerah yang dikelompokkan ke dalam 7 prioritas dengan bobot/agregat yang berbeda-beda, meliputi :

1. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan (bobot : 6%)
2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu (bobot : 6%)
3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik (bobot : 7,5%)
4. Penanganan tematik Kawasan rawan bencana (bobot : 10,5%)
5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana (bobot : 21%)
6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana (bobot : 35%)
7. Pengembangan sistem pemulihan bencana (bobot : 14%)

Akumulasi dari nilai tiap-tiap prioritas akan menghasilkan nilai “Indeks Ketahanan Daerah” dengan range kelas :

IKD < 0,4	: Rendah
0,4 < IKD < 0,8	: Sedang
IKD > 0,8	: Tinggi

Hasil Pengukuran terhadap IKD Kota Blitar adalah sebagai berikut :

- Perkuatan kebijakan dan kelembagaan (bobot : 0,84%)
- Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu (bobot : 0,80%)
- Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik (bobot : 0,81%)
- Penanganan tematik Kawasan rawan bencana (bobot : 0,55%)
- Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana (bobot (0,27%)
- Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana (bobot : 0,38%)
- Pengembangan sistem pemulihan bencana (bobot : 0,21%).

Sehingga capaian Indeks Kapasitas Daerah Kota Blitar tahun 2023 : **0,43**. Hal ini dikandung maksud kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan ancaman dan potensi kerugian akibat bencana secara terstruktur, terencana dan terpadu dikategorikan **SEDANG**. Capaian ini bisa dikatakan belum memenuhi target. Adapun permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut :

Permasalahan	Tindak Lanjut	Faktor Pendukung
Belum adanya kebijakan /regulasi/peraturan daerah yang mengatur tentang penanggulangan bencana	Pada Perubahan Anggaran tahun 2023 telah disusun NA dan Raperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan usulan tersebut sudah masuk di propem Perda dan pada Tahun Anggaran 2024 akan dilaksanakan pembahasan Perda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di DPRD	1. Tersusunnya Perda penyelenggaraan penanggulangan bencana 2. Tersedianya kelengkapan dokumen dan data dukung indeks kapasitas daerah yang bersumber dari lintas OPD 3. Komitmen instansi dan OPD terkait dalam pemenuhan bukti dukung / dokumen data IKD
Kurang lengkapnya dokumen dan bukti dukung dari OPD terkait dalam	1. Melakukan sosialisasi dan rapat koordinasi bersama OPD terkait tentang	

pemenuhan dokumen pendukung Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	pentingnya pemenuhan dokumen dan kelengkapan bukti dukung untuk pengisian IKD Tahun 2024 2. Menyelenggarakan FGD agar secara simultan dan berkelanjutan meminta stakeholder menyisir Kembali hasil evaluasi tahun sebelumnya untuk ditingkatkan kinerja output masing-masing variabel dari setiap indikator	
---	---	--

B. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar, Inspektorat Daerah Kota Blitar telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal dengan rincian nilai sebagai berikut :

Nilai SAKIP Perangkat Daerah

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
A	Perencanaan Kinerja	30%	27,11
B	Pengukuran Kinerja	30%	22,86
C	Pelaporan Kinerja	15%	13,73
D	Evaluasi Internal	25%	20,00
J U M L A H		100%	83,70
Kategori A (Memuaskan)			

No	Permasalahan	Tindaklanjut	Faktor Pendukung
A	Dokumen perencanaan kinerja telah disusun, namun kinerja dan indikator kinerja sasaran dalam dokumen perencanaan belum sepenuhnya menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dan memenuhi kriteria SMART (3.03.05)	Mereviu Kembali dokumen perencanaan secara menyeluruh	Komitmen yang kuat mulai dari pimpinan sampai dengan pelaksana perangkat daerah untuk terus menumbuhkan budaya kinerja melalui penerapan SAKIP
B	Data kinerja yang dikumpulkan belum sepenuhnya relevan dan belum sepenuhnya mendukung capaian kinerja yang diharapkan (3.03.05)	Melakukan evaluasi terhadap pengukuran kinerja untuk mendukung capaian kinerja yang diharapkan	
C	Informasi kinerja yang dituangkan dalam laporan kinerja telah	Memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi pengukuran	

	menjadi perhatian pimpinan namun belum dimanfaatkan secara optimal dalam perbaikan atas perencanaan kinerja dan strategi dalam pelaksanaannya (3.03.05)	kinerja untuk penyesuaian efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja	
D	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah ditindaklanjuti namun perlu dimanfaatkan lebih optimal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja (3.03.05)	Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja, perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi	

Realisasai capaian Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar **83,70 dengan kategori A (Memuaskan)**. Guna perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan menindaklanjuti dan memanfaatkan hasil evaluasi.

Tabel 3.2

2.Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menghadapi Bencana	Indeks Kapasitas Daerah	0,53	0,40	0,55	0,43

2	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	A (80)	Belum menjadi sasaran penilaian oleh Inspektorat	A (80)	83,70
---	---------------------------------------	-----------------	--------	--	--------	-------

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa :

Pada tahun 2022 target Indeks Kapasitas Daerah sebesar 0,53 dan realisasi adalah : 0,40 sehingga capaian sebesar 75,47% Sedangkan pada tahun 2023 target Indeks Kapasitas Daerah yang ditetapkan sebesar 0,55 dan realisasi adalah : 0,43. Sehingga capaian sebesar 78,18%. Terdapat peningkatan nilai indeks sebesar 0.03 dari tahun sebelumnya.

SAKIP OPD pada tahun 2022 belum menjadi sasaran penilaian oleh Inspektorat Daerah. Pada tahun 2023 target nilai SAKIP Badan penanggulangan Bencana Daerah 80 dan nilai yang diperoleh sebesar 83,70 dengan kategori A (Memuaskan).

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2023 dengan Intansi Sejenis

BPBD Kota Blitar dan BPBD Kabupaten Kediri memiliki indikator tujuan yang sama, yaitu indeks ketahanan daerah. IKD merupakan tools atau alat yang digunakan untuk mengukur seberapa tangguh upaya daerah dalam menghadapi bencana. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, diperlukan adanya optimalisasi sinergitas antar OPD dan elemen pendukung.

Indikator Kinerja		Target tahun 2022		Realisasi tahun 2022		Target tahun 2023		Realisasi tahun 2023	
BPBD Kota Blitar	BPBD Kab Kediri	BPBD Kota Blitar	BPBD Kab Kediri	BPBD Kota Blitar	BPBD Kab Kediri	BPBD Kota Blitar	BPBD Kab Kediri	BPBD Kota Blitar	BPBD Kab Kediri
Nilai Indeks Ketahanan Daerah	Nilai Indeks Ketahanan Daerah	0,56	0,59	0,40	0,59	0,58	0,63	0,43	0,63

Sumber : Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 – 2026

Tabel 3.4**3.Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Kinerja Tahun 2023		Tingkat kemajuan
			Target	Realisasi	
Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menghadapi Bencana	Indeks Kapasitas Daerah	0,61	0,55	0,43	70,49
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,72	80	83,70	99,97

Faktor pendukung Untuk mencapai target Indeks yang telah ditentukan pada akhir Renstra adalah ;

1. Tersusunnya Perda penyelenggaraan penanggulangan bencana
2. Tersedianya kelengkapan dokumen dan data dukung indeks kapasitas daerah yang bersumber dari lintas OPD
3. Komitmen instansi dan OPD terkait dalam pemenuhan bukti dukung / dokumen data IKD

Faktor pendukung Untuk mencapai target nilai SAKIP yang telah ditentukan pada akhir Renstra adalah adanya komitmen yang kuat mulai dari pimpinan sampai dengan pelaksana perangkat daerah untuk terus menumbuhkan budaya kinerja melalui penerapan SAKIP.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional (Target SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penyelenggaraan pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah daerah sesuai dengan indikator-indikator yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun

2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Badan Penanggulangan Bencana Daerah berusaha menerapkan SPM secara efektif dan meningkatkan mutu pelayanan.

Adapun penjelasan jenis pelayanan dasar untuk SPM Sub Urusan Bencana yang diampu oleh Badan Penanggulangan Bencana adalah :

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Tabel 3.5

TARGET PENCAPAIAN SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Tahun 2023	Target Nasional	Keterangan
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	100%	100%	Telah Dicapai Tahun 2022, Dipertahankan Capaiannya pada Tahun 2023
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	100%	Telah Dicapai Tahun 2022, Dipertahankan Capaiannya pada Tahun 2023

3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	Telah Dicapai Tahun 2022, Dipertahankan Capaiannya pada Tahun 2023
---	--	--	------	------	--

Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten/Kota berdasarkan Permendagri No.59 tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Data pencapaian dan penerapan SPM disajikan berdasarkan realisasi program dan kegiatan sebagai berikut:

1. **Pelayanan Informasi Rawan Bencana.**

Pelayanan informasi rawan bencana adalah pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana kepada warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Pelayanan informasi rawan bencana dibagi per jenis ancaman bencana, Pada tahun 2023, pelayanan informasi rawan bencana dilakukan dengan cara penyebarluasan informasi bencana melalui media sosial (Instagram, website), media elektronik (talkshow di radio) Di samping itu juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terlatih per jenis bencana. Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana diperoleh dari Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dibagi jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.6

DATA JUMLAH PENDUDUK DI KAWASAN RAWAN BENCANA YANG MEMPEROLEH INFORMASI RAWAN BENCANA SESUAI JENIS ANCAMAN BENCANA (BAHAYA GEMPA BUMI, CUACA EKSTRIM, DAN KEBAKARAN GEDUNG- PEMUKINAN KOTA BLITAR TAHUN 2023)

NO.	KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK DI KAWASAN RAWAN BENCANA YANG MEMPEROLEH INFORMASI RAWAN BENCANA SESUAI JENIS ANCAMAN BENCANA	JUMLAH PENDUDUK DI KAWASAN RAWAN BENCANA SESUAI JENIS ANCAMAN BENCANA
1	KAUMAN	214	214

2	PAKUNDEN	135	135
3	KEPANJENLOR	247	247
4	TANGGUNG	189	189
5	SUKOREJO	618	618
6	BLITAR	188	188
7	BENDO	207	207
8	NGADIREJO	362	362
J U M L A H		2.160	2.160
PERSENTASE		100 %	

Permasalahan yang dihadapi :

Belum memiliki fasilitator yang kompeten dan memenuhi secara jumlah dalam memberikan sosialisasi, Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Kebencanaan

Tindak Lanjut :

1. Bekerjasama dengan FPRB sesuai potensi yang dimiliki oleh masing-masing Organisasi Relawan Penanggulangan Bencana
2. Mendorong potensi SDM yang ada, untuk mengikuti Pelatihan / Bimtek Mitigasi Bencana

Faktor Pendukung :

1. Tersedianya fasilitator yang memiliki kompetensi secara kualitas dan kuantitas
2. Sudah terbentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) yang membantu memberikan sosialisasi KIE terkait upaya pengurangan risiko / mitigasi bencana

No.	Tanggal Pelaksanaan	Tempat	Acara	Keterangan
1	20 s/d 21 Maret 2023	Ruang Rapat Kantor BPBD Kota Blitar	Sosialisasi Forum Pengurangan Resiko Bencana Kota Blitar	
2	11 Mei 2023	Aula Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar	Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Kesiapsiagaan Disabilitas Dalam Bencana Menuju Keluarga Tangguh Bencana	
3	05 Mei 2023	Ruang Pertemuan SLB Negeri 2 Kota Blitar	Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Kesiapsiagaan Disabilitas Dalam Bencana Menuju Keluarga Tangguh Bencana	
4	29 dan 30 Maret 2023	Aula Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar	Sosialisasi Kesiapsiagaan Disabilitas Dalam Bencana	
5	21 September 2023	UPTD SDN Tanjungsari 1	Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Kesiapsiagaan dalam bencana	

6	20 November 2023	Rumah Makan President	Koordinasi Pengumpulan Data Kebencanaan Keltana dan FPRB	
7	24 November 2023	Beacukai Blitar	Sosialisasi Evakuasi Mandiri Bencana Gempa Bumi	
8	29 November 2023	KPP Pratama dan KPPN	Sosialisasi Evakuasi Mandiri Bencana Gempa Bumi	
9	1 Desember 2023	TKI Al Azhar 67	Sosialisasi Mitigasi Anak	

1	8 Agustus 2023	Webinar	Optimalisasi Peran ASN dalam Mitigasi Bencana sebagai Wujud Bela Negara	 The poster is for a webinar titled "Optimalisasi Peran ASN dalam Mitigasi Bencana sebagai Wujud Bela Negara". It features five speakers: Priyo Suhartono (Narasumber 1), Drs. H. Santoso (Keynote Speaker), Gatot Soebroto (Narasumber 2), Agus Suherli (Narasumber 3), and Agung Wijayanto (Moderator). The event is organized by BKPSDM Kota Blitar and is part of the KOLABJAR program. Registration is free and includes a certificate. The event will be held on August 8, 2023, at 08.00 WIB via Zoom and YouTube. WEBINAR KOLABJAR "Optimalisasi Peran ASN dalam Mitigasi Bencana sebagai Wujud Bela Negara" NARASUMBER 1 Priyo Suhartono, S.Sos., M.Si Sekretaris Daerah Kota Blitar KEYNOTE SPEAKER Drs. H. Santoso, M.Pd. Walikota Blitar NARASUMBER 2 Gatot Soebroto, SE, M. PSDM Kepala Pelaksana BPBD Prov. Jatim NARASUMBER 3 Agus Suherli, SH Kepala Pelaksana BPBD Kota Blitar MODERATOR Agung Wijayanto, SE, M.M. Analisis Kepegawalan Ahli Pertama ZOOM MEETING ID : 879 6452 2318 PASSCODE : kolabjar TANGGAL : 8 AGUSTUS 2023 PUKUL : 08.00 WIB LIVE YOUTUBE BKPSDM KOTA BLITAR Pendaftaran untuk ASN Kota Blitar melalui Aplikasi SMEDI PENDAFTARAN GRATIS FREE E-SERTIFIKAT TERSEDIA SOUVENIR MENARIK (bagi ASN Kota Blitar) TERMINAL @bkpsdmkotablitar @bkpsdmblitkot http://bkd.blitarkota.go.id
---	----------------	---------	---	---

2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana adalah serangkaian kegiatan pra-bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga negara dalam menghadapi bencana. Pelayanan di bidang ini tetap dibagi atau disesuaikan dengan jenis bencana yang ada. Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana diperoleh dari jumlah warga negara memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dibagi jumlah warga negara yang berada di Kawasan rawan bencana. $663 : 663 \times 100 \% = 100\%$ sebagaimana table di bawah ini ;

Tabel 3.7

**DATA PELATIHAN KEBENCANAAN BAGI WARGA DI KOTA BLITAR
TAHUN 2023**

NO.	KELURAHAN	JUMLAH WARGA DAERAH RAWAN BENCANA
1	KAUMAN	114
2	PAKUNDEN	35
3	KEPANJENLOR	100
4	TANGGUNG	89
5	SUKOREJO	118
6	BLITAR	88
7	BENDO	57
8	NGADIREJO	62
J U M L A H		663

Tabel 3.8

**DATA PELATIHAN APARATUR KEBENCANAAN DI KOTA BLITAR
TAHUN 2023**

No.	URAIAN	JUMLAH
1	SPAB	100
2	Pelatihan Dasar Bencana FPRB	100
3	KELTANA	100

4	Simulasi Kebencanaan	100
	Jumlah	400

Permasalahan yang dihadapi :

1. Kurang optimalnya komunikasi dan koordinasi dengan OPD terkait
2. Perlunya peningkatan kapasitas bagi SDM penanganan bencana secara menyeluruh

Tindaklanjut :

1. Menambah volume jenis dan jumlah peserta pelatihan dasar pengurangan bencana guna meningkatkan kualitas kemampuan SDM dalam penanganan bencana
2. Simulasi bersama stakeholder per masing-masing risiko bencana

Faktor Pendukung :

1. Adanya pengembangan SDM baik secara formal dan informal dalam melaksanakan tahapan manajemen bencana yang meliputi : Pra bencana, saat terjadi bencana, pasca bencana.

Guna mendukung tercapainya realisasi pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, hal-hal yang telah dilakukan meliputi ;

1. Pembentukan Forum PRB

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) merupakan salah satu rencana aksi daerah yang meliputi unsur pemerintah daerah, non-pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media yang dikoordinasikan oleh BPBD.

Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) bertujuan untuk mengkoordinasikan upaya pengurangan risiko bencana di tingkat kota. Berikut beberapa hal yang biasanya tercakup dalam forum semacam ini:

1. **Perencanaan dan Koordinasi Lokal:** Forum PRB di tingkat kabupaten atau kota berfungsi sebagai wadah untuk menyusun rencana aksi dan strategi pengurangan risiko bencana yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah setempat.

2. **Pemetaan dan Analisis Risiko:** Melakukan pemetaan dan analisis risiko bencana untuk memahami potensi bahaya, kerentanan, dan kapasitas adaptasi di wilayah sebagai dasar untuk merumuskan strategi mitigasi dan respons bencana.
3. **Pelibatan Komunitas:** Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengurangan risiko bencana berupa penyuluhan, pelatihan evakuasi, dan upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.
4. **Koordinasi dengan Pihak Eksternal:** Menjalin kerjasama dengan pihak eksternal seperti lembaga pemerintah pusat, lembaga internasional, dan lembaga donor untuk mendukung implementasi program pengurangan risiko bencana.
5. **Pemantauan dan Evaluasi:** Membangun sistem pemantauan dan evaluasi untuk memantau kemajuan implementasi program, mengukur dampaknya, dan mengevaluasi efektivitasnya sebagai langkah perbaikan berkelanjutan dalam upaya pengurangan risiko bencana.
6. **Penyediaan Informasi dan Sistem Peringatan Dini:** Menyediakan informasi terkini tentang risiko bencana dan sistem peringatan dini kepada masyarakat. Hal ini membantu meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi ancaman.

Forum PRB di tingkat kota memiliki peran kunci dalam menghubungkan kebijakan nasional dengan kebutuhan dan dinamika lokal. Dengan demikian, forum semacam ini menjadi platform penting untuk mengintegrasikan pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan.

Forum PRB yang dibentuk oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar pada tanggal 6 September 2023 merupakan mitra kerja pemerintah daerah dalam melaksanakan pengurangan risiko bencana serta tugas/kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan

penanggulangan bencana pada umumnya. Anggota FPRB Kota Blitar meliputi : BPBD, Bagian Hukum Setda Kota Blitar, Dinas Kesehatan, DLH, Damkar, Tagana-Dinsos, Bappena PNI, Poltekkes, PMI, ORARI, RAPI, Stikes Patria Husada, Stikes, MDMC, Resob, Keltana Bendo, Forum Me-Dan, BNC, Alumni Menwa, Sahabat Alam, Garda Nusantara, LPB NU, Infokom, Radio ASA FM, Podcasr Polkesma, Senkom, Mahardika FM, LMI, BP 1331, Jaladri, Panther SHT, BSMI, Dinas PU.

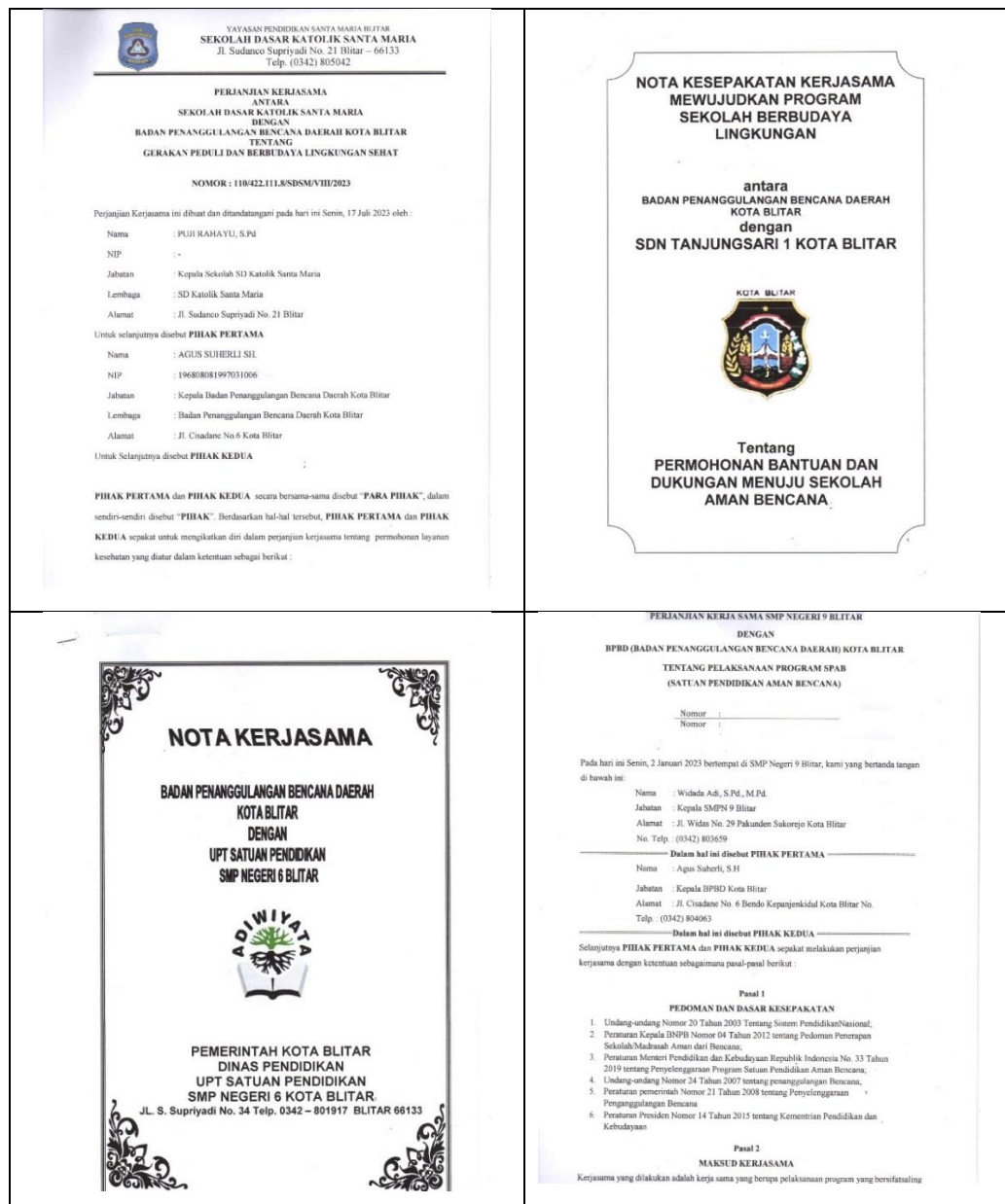
Forum Pengurangan Resiko Bencana Kota Blitar dibentuk dengan Surat Keputusan Walikota Blitar dengan masa bhakti 5 (lima) tahun. Kegiatan Forum Pengurangan Resiko Bencana Kota Blitar difasilitasi melalui DPA SKPD BPBD Kota Blitar baik berupa kegiatan rutin maupun penanganan bencana serta peningkatan kapasitas relawan. Forum Pengurangan Resiko Bencana merupakan forum tempat bertemunya atau tempat berkumpulnya para pihak pemangku kepentingan, baik individu maupun lembaga yang mempunyai perhatian dan kepedulian yang sama terhadap agenda pengurangan resiko bencana.

Tujuan dari Forum PRB ini salah satunya terbentuknya suatu forum yang mewadahi para pihak yang berkepentingan dalam melakukan advokasi pengurangan risiko bencana di Kota Blitar.

Nama Kegiatan	Pembentukan FPRB
Tanggal	6 September 2023
Tempat	Kecamatan Kepanjenkidul
	

2. Penguatan Kelembagaan berupa Penandatanganan MOU / Nota kesepahaman dengan pihak sekolah

Agar tercipta pemahaman, kesiapsiagaan penguatan kelembagaan sekolah baik struktural maupun non struktural pada kegiatan pengurangan risiko bencana di sekolah dalam penanggulangan bencana di Kota Blitar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar menjalin Kerjasama dengan beberapa sekolah di wilayah Kota Blitar untuk layanan peduli dan berbudaya lingkungan sehat dan pelaksanaan program SPAB, diantaranya: SD Negeri Tanjungsari 1, SD Katolik Santa Maria, SMP Negeri 6, dan SMP Negeri 9 dengan tujuan untuk memberikan pelayanan edukasi sigap bencana alam kepada siswa dan atau orang tua yang dibutuhkan sekolah agar tercipta kenyamanan dan keamanan yang optimal dalam proses belajar dan mengajar di sekolah.



3. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penanggulangan Bencana Tahun 2023

Upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Blitar selama ini belum memadukan perencanaan pembangunan daerah dengan rencana penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana sehingga upaya penanganan bencana lebih banyak pada tindakan pemberian bantuan (relief) dan kedaruratan (emergency).

Hal ini disebabkan karena Pemerintah Kota Blitar belum memiliki landasan hukum yang mampu mewadahi urusan tersebut berupa

peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sehubungan dengan hal itu, pemerintah Kota Blitar berupaya Menyusun peraturan daerah tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 diawali dengan penyusunan Naskah peraturan daerah tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sesuai

dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 diawali dengan penyusunan Naskah Akademik sebagai landasan yang bersifat akademis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmu hukum dan politik hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah. Naskah Akademik memuat hasil penelitian mengenai materi muatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Blitar yang dikaji secara ilmiah, terukur, sistematis, dan memenuhi kaidah-kaidah penelitian guna mendapat hasil yang mencerminkan realita fakta di lapangan, sehingga ketika menjadi PERDA sudah memiliki kepastian hukum, berdayaguna, dan berhasil guna bagi kepentingan masyarakat dan pemerintah Kota Blitar.

4. Penyusunan dokumen Rencana Kontinjensi

Mengingat permasalahan bencana cuaca Ekstrim tidak dapat dihindari, perlu dilakukan suatu upaya penataan atau perancangan yang matang dalam penanggulangannya. Sehingga, apabila timbul dampak dari adanya cuaca Ekstrim, penanggulangan dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu. Penanganan bencana bukan lagi hanya menjadi tanggungjawab pemerintah saja tetapi menjadi urusan bersama masyarakat. Oleh karenanya, untuk mencapai sasaran tersebut perlu disusun dokumen Kajian Rencana Kontingensi Cuaca Ekstrim Kota Blitar Tahun 2023-2026 yang menyajikan semua aspek termasuk diantaranya kondisi geografis dan kearifan lokal masyarakat sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana yang diimplementasikan pada kegiatan

penanggulangan bencana cuaca Ekstrim dalam setiap tahapannya dapat dilaksanakan secara maksimal.

Perencanaan kontingensi Cuaca Ekstrim ini dimaksudkan untuk memberikan panduan dalam penanganan kedaruratan bencana Cuaca Ekstrim di Kota Blitar yang efektif dengan melibatkan multi pihak secara partisipatif.

NO	TANGGAL PELAKSANAAN	TEMPAT KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	DOKUMENTASI
1	23 s/d 25 mei 20223	Pos Basarnas Trenggalek	Pelatihan Sar Urban	
2	08 s/d 14 Maret 2023	Kantor Kelurahan Bendo Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar	Penguatan kapasitas Kelurahan Tangguh Bencana (Keltana) Kelurahan Bendo Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar	
3	18 s/d 20 Agustus 2023	Coban Putri, desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu Provinsi Jawa Timur	Jambore Kemanusiaan II FPRB Jatim 2023	
4	08 s/d 09 September 2023	Aula Kecamatan Sukorejo Kota Blitar	Monitoring dan Evaluasi Kelurahan Tangguh Bencana Kota Blitar (Menghadapi Cuaca Extrim)	
5	22 s/d 24 September 2023	Lapangan Desa Nguntoronadi, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Magetan	Jambore Relawan Penanggulangan Bencana Tahun 2023	

6	04 s/d 05 Oktober 2023	PP Assirojiyyah, Kelurahan Rong Tengah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang	Mubes IV FPRB Jawa Timur Tahun 2023	
7	04 s/d 06 September 2023	Balai Kelurahan Bendo Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana (Menghadapi Cuaca Ekstrem)	
8	19 s/d 21 Oktober 2023	Balai kelurahan gedog, kelurahan bendo, kelurahan tanjungsari	Penyusunan Dokumen Forum Kelurahan Tangguh Bencana kota Blitar Tahun 2023	
9	06 dan 07 September 2023	Gedung serba Guna Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar	Rakor fasilitasi dan Pemilihan Pengurus FPRB Kota Blitar	

3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Persentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana tahun 2023 adalah 100% yaitu $27.450/27.450 \times 100\%$ yang diperoleh dari jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dibagi jumlah warga negara yang menjadi korban bencana

Tabel 3.9
DATA JUMLAH KORBAN KEBENCANAAN
DI KOTA BLITAR TAHUN 2023

NO.	KEJADIAN BENCANA	JUMLAH KORBAN (ORANG)	JUMLAH KORBAN YANG BERHASIL DITANGANI (ORANG)
1	Covid-19	7	7
2	Cuaca Ekstrem (Angin Kencang)	25.390	25.390
3	Banjir	50	50
4	Kebakaran	298	298
5	Kekeringan	1.411	1.411
6	Talud Ambrol	24	24
7	Pohon Tumbang	26	26
8	Dahan Patah	0	0
9	Tanah Ambles	0	0
10	Saluran Irigasi Ambrol	220	220
11	Kebakaran Rumah Huni	8	8
12	Laka Sumur	2	2
13	Kebakaran Gudang Engine Diesel Air	10	10
14	Kebakaran Pabrik Bubut	4	4
	JUMLAH	27.450	27.450
	PERSENTASE	100 %	

Tabel 3.10
DATA LAYANAN PUSDALOPS
DI KOTA BLITAR TAHUN 2023

NO.	LAYANAN KEBENCANAAN	JUMLAH KEJADIAN	JUMLAH WARGA TERDAMPAK TERTANGANI
1	Covid-19	7	7
2	Cuaca Ekstrim (Angin Kencang)	11	25.390
3	Banjir	1	50
4	Kebakaran	4	298
5	Kekeringan	1	1.411
6	Talud Ambrol	2	24
7	Pohon Tumbang	9	26
8	Dahan Patah	8	0
9	Tanah Ambles	1	0
10	Saluran Irigasi Ambrol	1	220
11	Kebakaran Rumah Huni	2	8
12	Laka Sumur	2	2
13	Kebakaran Gudang Engine Diesel Air	1	10
14	Kebakaran Pabrik Bubut	1	4
	JUMLAH	51	27.450

Permasalahan yang dihadapi :

1. Pentingnya pengadaan kendaraan rescue, Alat komunikasi, Sepeda motor trail, truk tanki air bersih

Tindak Lanjut :

1. Penambahan alokasi anggaran untuk Pengadaan dan Pemeliharaan Sarpras sesuai kebutuhan
2. Tersedianya sarpras penanganan bencana yang memenuhi dan

mendukung pencegahan dan penanganan bencana

Faktor Pendukung :

1. Tersedianya sarpras penanganan bencana yang memenuhi dan mendukung pencegahan dan penanganan bencana.

Pemantauan kondisi alam dan aktivitas terhadap potensi bencana perlu dilakukan terus menerus. Informasi terkait bencana perlu dikumpulkan, diproses, dianalisis dan selanjutnya disusun laporan. Informasi disini tidak hanya menyangkut kejadian bencana, namun juga upaya penanganan yang dilakukan oleh berbagai pihak baik saat pra bencana maupun pasca bencana. Pada proses ini perlu adanya Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) yang mampu mengelola data dan informasi hingga menyebarkan kepada pejabat berwenang maupun masyarakat melalui media. Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat PUSDALOPS PB adalah unsur pelaksana di BPBD yang bertugas menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi penanggulangan bencana

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

UNIT OPERASI (URC)	PUSDALOPS
1. Melaksanakan pengkajian awal secara cepat dan tepat di lokasi kejadian / bencana dengan mengidentifikasi: a. cakupan lokasi kejadian / bencana b. jumlah korban c. kerusakan sarana dan prasarana d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan 2. Melaksanakan tindakan awal dalam penanganan kejadian baik jiwa maupun harta benda 3. Mengaktivasi Posko PB / BPBD Kota Blitar 4. Memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan kejadian / bencana	Tugas Pokok: 1. Sebelum kejadian / bencana: memberikan dukungan kegiatan pada saat sebelum bencana (pengumpul, pengolah, penyaji data dan informasi kebencanaan) secara rutin 2. Saat kejadian / bencana: memberikan dukungan pada Posko Tanggap Darurat dan Pelaksanaan Kegiatan Darurat 3. Paska kejadian / bencana: memberikan dukungan kegiatan pada saat setelah kejadian / bencana terjadi (penyedia data dan informasi khususnya dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi) Fungsi: 1. Fungsi penerima, pengelola dan pendistribusi informasi kebencanaan

5. Menyampaikan saran yang tepat dalam upaya penanganan kejadian / bencana 6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik: - Laporan awal sesaat setelah tiba di lokasi kejadian / bencana - Laporan berkala / perkembangan (harian dan insidentil) - Laporan lengkap/akhir penugasan Sumber: Peraturan Kepala BNPB Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana	2. Fungsi penerima, pengolah, dan penerus peringatan dini kepada instansi terkait masyarakat 3. Fungsi tanggap darurat sebagai fasilitator pengeralhan sumber daya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara cepat tepat, efisien dan efektif 4. Fungsi koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi pelaksanaan penanggulangan bencana Tanggungjawab: - Secara Struktural: unit pemantau kebencanaan dari BPBD yang menyelenggarakan kegiatan penanggulangan bencana - Secara Institusional: sebagai pelaksana amanah peraturan perundang-undangan kebencanaan yang berlaku - Secara Operasional: sebagai pelaksana tugas pokok, fungsi, dan peran Pusdalops PB Sumber: Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB)
---	--

 PEMERINTAH KOTA BLITAR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Nomor SOP	300.21/02/410.205/2023
	Tgl Pembuatan	12 Januari 2023
	Tgl Revisi	
	Tgl Pengesahan	
	Disahkan Oleh	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar  AGUS SUHERLI, SH. Pembina Tk. I NIP. 19680808 199703 1 006
Nama SOP	Informasi Kejadian Awal	

Dasar Hukum 1. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana; 2. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 4. Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 5. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan BPBD; 6. Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB); 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tanggal 27 September 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur;	Kualifikasi Pelaksana 1. Memahami Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Pusdalops PB. 3. Memahami mekanisme penanggulangan bencana. 4. Mempunyai kemampuan untuk pelaksanaan penyusunan perencanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. 5. Mempunyai kemampuan untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum penanggulangan bencana. 6. Mampu menggunakan komputer dan perangkat lunaknya. 7. Mampu menggunakan radio komunikasi.
Keterkaitan 1. SOP Kedaruratan	Peralatan/Perlengkapan 1. Buku Kerja / Pedoman, 2. Komputer Lengkap, Telepon, Seluler, Radio Komunikasi dan Server.
Peringatan : 1. Diperlukan koordinasi dengan seluruh Bidang terkait.	Pencatatan dan Pendataan : 1. Komponen/unit kerja yang terkait

SOP INFORMASI AWAL BENCANA

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu baku			Keterangan
		Operator	Supervisor	Manager	Kalaksa	Kabid KL	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima Informasi Kejadian	mulai					Berita Kejadian	5 menit	Logsheet Kejadian	Terkait dengan SOP Penyusunan Laporan Harian / Khusus
2	Konfirmasi dan klarifikasi ketepatan berita						Telepon/Radio/Email/Whatsapp	10 - 30 menit	Informasi Kejadian (benar/tidak)	Pihak Terkait : Relawan, Jajaran Samping, OPD Terkait PB di level Kabupaten/Kota
3	Menginventarisir Data Kejadian (1. Lengkap / 2. Belum Lengkap)						Komputer, Format Teks Laporan Awal Kejadian	10 menit	Update Data Awal Kejadian	
4	Membuat Laporan Awal Kejadian						Komputer dan Printer, Format Teks Laporan Awal Kejadian	10 menit	Draft Laporan Awal Kejadian	
5	Mengoreksi, menganalisis & melaporkan ke Pimpinan (Meminta persetujuan untuk meneruskan Laporan ke Pihak Terkait)						Draft Laporan Awal Kejadian, Format Hasil Analisa	30 menit	Koreksi Laporan Awal Kejadian, Hasil Analisa	Pihak Terkait : Internal BPBD, Pusdalops BPBD Provinsi Jawa Timur, Jajaran Samping, OPD Terkait PB
6	Mengoreksi, memberikan persetujuan serta mendisposisi ke Bidang KRR untuk Tindak Lanjut (1.Ya/2.Tidak)						Laporan Awal Kejadian, Hasil Analisa, Nota Dinas	30 menit	Disposisi untuk Menyiapkan Laporan Khusus ke Gubernur dan Perintah untuk Pergerakan TRC	Terhubung dengan SOP Kedaruratan apabila terjadi eskalasi / status Bencana Provinsi
7	Menyampaikan Laporan ke Pihak Terkait						Komputer, Whatsapp Group	5 menit	Laporan Awal Moda Teks Whatsapp Group	Pihak Terkait : Internal BPBD, Pusdalops BPBD Provinsi Jawa Timur, Jajaran Samping, OPD Terkait PB
8	Menyimpan Laporan Awal sebagai bahan pembuatan Laporan Harian / Khusus	selesai					Komputer, Server	5 menit	Berkas Digital pada Hardisk Server	



Sebagai salah satu upaya mitigasi bencana hidrometeorologi di wilayah Kota Blitar, BPBD Kota Blitar secara aktif menyebarluaskan informasi kepada masyarakat terkait perkembangan kondisi cuaca yang terjadi di wilayah Kota Blitar yang bersumber dari informasi resmi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Informasi tersebut didapatkan melalui saluran resmi BMKG Stasiun Meteorologi Juanda Sidoarjo meliputi antara lain :

1. Release cuaca mingguan
2. Prakiraan cuaca harian
3. Peringatan dini cuaca tiga harian
4. Peringatan dini cuaca tiga jam sebelum kejadian

Informasi tersebut sangat bermanfaat bagi BPBD Kota Blitar dalam

mengantisipasi cuaca ekstrim dan bencana hidrometeorologi yang dapat menimpa sewaktu-waktu.

Untuk mengukur kekuatan getaran gempa yang terjadi, BMKG telah memasang alat berupa intensity meter di Kota Blitar yang mampu merekam getaran gempa, selanjutnya mengirimkan data ke pusat pengolahan data gempa BMKG dan diproses untuk mendapatkan hasil berupa peta guncangan.

Selain intensity meter, Kota Blitar juga telah mendapatkan fasilitas peralatan dari BMKG berupa monitor WRS INATEWS (Warning Receiver System Indonesian Tsunami Early Warning System). Fungsi WRS INATEWS BMKG Indonesia adalah memberikan peringatan dini terhadap potensi terjadinya tsunami di wilayah Indonesia. Sistem ini dirancang untuk mendeteksi gempa bumi bawah laut yang dapat menyebabkan tsunami dan memberikan peringatan kepada masyarakat serta pihak berwenang untuk mengambil tindakan pencegahan. Beberapa fungsi utama antara lain pendeteksian gempa bumi bawah laut, pengumpulan dan analisa data, peringatan dini serta pengembangan kesadaran masyarakat. WRS INATEWS yang ada di BPBD Kota Blitar terhubung secara online dengan website BMKG, dan memberikan informasi gempa bumi secara real time di seluruh wilayah Indonesia. Apabila ada informasi terkait Kota Blitar akan segera disebarluaskan melalui media informasi yang dikelola oleh PUSDALOP PB baik berupa media sosial maupun group whatsapp penanggulangan bencana. Pusdalops

BPBD Kota Blitar juga menerima bantuan Early Warning System (EWS) gempa bumi dari BPBD Provinsi Jawa Timur berupa sirine detector yang akan menyala dan memberikan peringatan berupa nyala lampu dan sirine apabila terjadi guncangan gempa bumi dengan kekuatan 5 skala richter ke atas. Alat detector ini berjumlah 2 (dua) unit, terpasang di kantor BPBD Kota Blitar dan di Pasar Legi.



Kota Blitar pada 7 Desember 2023 melaksanakan kegiatan Apel Siaga Kedaruratan Bencana Hidrometeorologi yang bertempat di Halaman Kantor Walikota Blitar. Bertindak bersama-sama selaku Inspektur Apel adalah Walikota Blitar, Kapolres Blitar Kota, Komandan Kodim 0808, DanYonif 511 dan Kajari Blitar. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesiapan seluruh unsur penanggulangan bencana di Kota Blitar dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.

Apel siaga diikuti oleh personil gabungan berbagai unsur pentahelix penanggulangan bencana antara lain; Polres Blitar Kota, Kodim 0808, Yonif 511, Satpol PP, Pemadam Kebakaran, Dinas Lingkungan Hidup, DPUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, PMI, Tagana dan perwakilan dari Komunitas Relawan Bencana. Selain meningkatkan kesiapan warga masyarakat, Apel Siaga ini juga sekaligus untuk melakukan pengecekan kesiapan peralatan, sarana prasarana serta Personil dalam Penanggulangan Bencana.

Diharapkan dengan dilaksanakannya Apel Siaga Kedaruratan Bencana Hidrometeorologi ini seluruh warga masyarakat khususnya personil penanggulangan bencana dapat lebih tanggap, tangkas, dan tangguh dalam menghadapi bencana.

Nama Kegiatan	Apel Kesiapsiagaan Bencana	
Tanggal	7 Desember 2023	
Tempat	Halaman Kantor Walikota	
3/3  2/3  		



**LOG BOOK KEJADIAN / BENCANA PUSDALOPS – PB
BPBD KOTA BLITAR
TAHUN 2023**

Tgl Kejadian	Jenis Kejadian	Lokasi	Kronologi	Jumlah			Penanganan	Tindak Lanjut	Dokumentasi
				Korban	Kerusakan	Kerugian			
2 Januari 2023	Talud ambrol	Jl. Beliton, Kel. Karangtengah, Kec. Sananwetan; (- 8°6'32,616"S 112°10'22,672"E)	Hujan intensitas ringan berlangsung beberapa jam hingga menyebabkan talud ambrol yang berdampak pada bangunan sekitar	NIHIL	Talud pasangan batu kali ukuran 15 x 4m	±Rp. 100.500.000,-	Pemasangan terpal untuk mengurangi longsor susulan	Koordinasi lebih lanjut dengan Dinas PUPR	 



Tgl Kejadian	Jenis Kejadian	Lokasi	Kronologi	Jumlah			Penanganan	Tindak Lanjut	Dokumentasi
				Korban	Kerusakan	Kerugian			
24 Januari 2023	Pohon Tumbang	Jl. Sodanco Supriadi, Bendogerit, Sananwetan	Hujan intensitas ringan pohon tumbang menimpa bangunan rumah warga	NIHIL	Kerusakan pada bagian atap teras rumah warga	Rp 500.000,-	Penyaluran bantuan terpal sebagai pengganti atap rusak	SELESAI	 



Tgl Kejadian	Jenis Kejadian	Lokasi	Kronologi	Jumlah			Penanganan	Tindak Lanjut	Dokumentasi
				Korban	Kerusakan	Kerugian			
2 Februari 2023	Dahan Patah Jenis pohon Pule diameter 20cm	Pasar Hewan Dimoro Jl. Batanghari No.46, Kel. Sukorejo, Kec. Sukorejo, Kota Blitar, Jawa Timur 66121	Hujan intensitas ringan turun selama 6 jam menyebabkan salah satu dahan pohon jenis Pule diameter 20cm patah di area pasar hewan Dimoro	NIHIL	NIHIL	NIHIL	Assesment	SELESAI	 



Tgl Kejadian	Jenis Kejadian	Lokasi	Kronologi	Jumlah			Penanganan & Unsur Yang Terlibat	Tindak Lanjut	Dokumentasi
				Korban	Kerusakan	Kerugian			
12 Februari 2023	Atap tersapu angin akibat angin kencang	Jl. Brigjen Katamso RT.02 RW.11, Kel. Gedog, Kec. Sananwetan	Serta menyebabkan atap rumah 1 warga tersapu angin	1	Atap rumah warga a.n Ny. Lika	±Rp 1.000.000,-	Pemasangan terpal oleh: 1. BPBD Kota Blitar 2. Babinsa Gedog 3. Keltana Gedog 4. Agen Informasi Bencana Wil. Kota Blitar Warga Sekitar	Perlu dilakukan rehabilitasi rumah warga terdampak	



Tgl Kejadian	Jenis Kejadian	Lokasi	Kronologi	Jumlah			Penanganan & Unsur Yang Terlibat	Tindak Lanjut	Dokumentasi
				Korban	Kerusakan	Kerugian			
19 Februari 2023 Pkl 09.43	Tanah Ambles	Taman Sentul, Jl. Cakraningrat Kel. Sentul, Kec. Kepanjenkidul	terjadi tanah ambles di area Wisata Taman Sentul, tanah ambles terjadi akibat struktur tanah yang tidak stabil. Tanah Ambles kedalaman ± 3 meter dengan lebar ± 1 meter, panjang ± 4 meter	NIHIL	NIHIL	NIHIL	Pemasangan garis pembatas (<i>police line</i>) di sekitar tanah ambles dekat talud oleh BPBD Kota Blitar	Koordinasi dengan DLH	

REKAP KEGIATAN PEMAKAMAN DENGAN PROTOKOL KESEHATAN
TRC BPBD KOTA BLITAR TAHUN 2023

TANGGAL, BULAN	KEGIATAN	DOKUMENTASI	
Selasa, 21 Februari 2023	Pemakaman protokol covid – 19 di TPU Karanglo Nama : Tn. Edi Supriono NIK : 3572030505550006 Usia : 67 th Alamat : Jl. Bawean No.72 RT 2/14 Sananwetan Vaksin : telah vaksin ke 2 (CoronaVac) MD dengan diagnosa Pneumonia Covid-19 + Cardiac Arrest (henti jantung) di RS Ngudi Waluyo Wlingi pkl 01.45 WIB		
Minggu, 26 Februari 2023	Pemakaman protokol covid – 19 TPU Plumbangsari Nama : Ny. Rochani NIK : 3572015708750002 Alamat : Jl. Kelud No. 40 RT.2/3 Kepanjenlor Kepanjenkidul Vaksin : telah vaksin ke 1 (Astra Zeneca) MD dengan diagnosa CVA (Stroke) + GGA (Gagal Ginjal Akut) + Covid - 19 di RS Ngudi Waluyo Wlingi		



Tgl Kejadian	Jenis Kejadian	Lokasi	Kronologi	Jumlah			Penanganan & Unsur Yang Terlibat	Tindak Lanjut	Dokumentasi
				Korban	Kerusakan	Kerugian			
3 Maret 2023 Pkl 21.00 WIB	Saluran Irigasi Ambrol	Jl. Ranupane Kel. Tanjungsari Kec. Sukorejo	Hujan Lebat menyebabkan debit air meningkat menyebabkan bangunan irigasi dekat Masjid ambrol. Pukul 07.40 WIB BPBD mendapat laporan, pukul 07.50 WIB Menuju lokasi ambrol	NIHIL	berdampak pada bangunan Musholla Al-Hikmah bangunan ambrol sepanjang 6mx2m (Kamar mandi dan tempat wudhu)	- Kerugian material: ±42 juta	Pembersihan dilakukan pada tanggal 3/3/2023 mulai pukul 07.40 WIB oleh: - BPBD Kota Blitar - Perangkat Setempat - Keltana Tanjungsari - Warga Sekitar	Koordinasi untuk penanganan lebih lanjut dengan Dinas PUPR	



Tgl Kejadian	Jenis Kejadian	Lokasi	Kronologi	Jumlah			Penanganan & Unsur Yang Terlibat	Tindak Lanjut	Dokumentasi
				Korban	Kerusakan	Kerugian			
4 Maret 2023 12.00 WIB	Kebakaran Rumah	Jl. Kelud, RT 02/03 Kel. Kepanjenlor, Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar	Kebakaran diduga karena konsleting listrik	NIHIL	Bagian rumah	± Rp 32.000.000,-	Pemadaman, Pendinginan, dan penyelamatan dokumen serta barang berharga oleh: - BPBD Kota Blitar - Damkar Kota Blitar - Damkar Kabupaten Blitar - Polsek Kepanjenkidul - Babinsa Kel. Kepanjenlor - PLN - Agen Bencana Jatim Wil. Kota Blitar - Warga Setempat	-	  

TANGGAL, BULAN	KEGIATAN	DOKUMENTASI
Senin, 13 Maret 2023	Pemakaman protokol covid – 19 TPU Rembang Nama : Titisari, S.Pd NIK : 3572035007690004 Usia : 53 th Alamat : Jl. Dadap No 22 Rt.2/1 Rembang, Sananwetan Vaksin : telah vaksin ke 3 / booster 1 (Astra Zeneca) MD dengan diagnosa Cardiac Arrest (Henti jantung) + Hipoglikemi (kadar gula darah rendah) + Covid-19 di RSU Aminah pkl 20.00	
Rabu, 12 April 2023	Pemakaman protokol covid – 19 di TPU Tanjungsari (Mbah Tanjung) Nama : Tn. Sukarman NIK : 3572030612410003 Alamat : Jl. Maninjau Blok E No. 14 RT/RW 2/4 Tanjungsari, Sukorejo Vaksin : telah vaksin ke 3 / booster 1 (Pfizer) MD dengan diagnosa Cardiac Arrest (henti jantung) + CVA (stroke) + Covid-19 di RS Mardi Waluyo pkl 19.30	



Tgl Kejadian	Jenis Kejadian	Lokasi	Kronologi	Jumlah			Penanganan & Unsur Yang Terlibat	Tindak Lanjut	Dokumentasi
				Korban	Kerusakan	Kerugian			
9 Mei 2023 Pukul 17.22 WIB	Banjir Luapan	Jl. Sudanco Supriadi, Kel. Bendogerit, Kec. Sananwetan	Hujan sedang sejak siang hingga sore hari menyebabkan luapan air pada drainase (aliran parit) yang meluap di badan jalan	NIHIL	NIHIL	Mengganggu arus lalu lintas jalan raya Jl. Sudanco Supriadi	Kaji cepat, pembersihan saluran (drainase) yang mengalami sumbatan sampah warga oleh: 1. BPBD Kota Blitar 2. Agen Informasi Bencana Wilayah Kota Blitar	SELESAI	  



Tgl Kejadian	Jenis Kejadian	Lokasi	Kronologi	Jumlah			Penanganan & Unsur Yang Terlibat	Tindak Lanjut	Dokumentasi
				Korban	Kerusakan	Kerugian			
Sabtu, 20 Mei 2023 08.00 WIB	Laka sumur	Jl. Bogowonto Kel. Pakunden, Kec. Sukorejo	Saksi (Ny. Jumiarsih akan menemui korban / Tn. Sutardi 72th didapati kursi didekat sumur	1 orang laki laki usia 72 th meninggal dunia	NIHIL	NIHIL	Evakuasi korban dilakukan oleh: 1. BPBD Kota Blitar 2. Agen Informasi Bencana Provinsi Jawa Timur Wil. Kota Blitar 3. Damkar Kota Blitar 4. Damkar Kab Blitar 5. Polsek Sukorejo 6. Babinsa Sukorejo 7. RS Syuhada' Haji 8. Perangkat Wil Sukorejo 9. Warga Setempat	Korban meninggal dunia dilakukan otopsi di RS Syuhada' Haji Kota Blitar	  



Tgl Kejadian	Jenis Kejadian	Lokasi	Kronologi	Jumlah			Penanganan & Unsur Yang Terlibat	Tindak Lanjut	Dokumentasi
				Korban	Kerusakan	Kerugian			
Kamis, 20 Juli 2023 13.25 WIB	Kebakaran Lahan	Jl. Wilis, Kel. Sukorejo, Kec. Sukorejo	Kebakaran lahan diduga karena pembakaran sampah di lahan kosong yang ditumbuhi rumput kering	NIHIL	Luas cakupan area terbakar $\pm 10m^2$	NIHIL	Pemadaman api dan assesment dilakukan oleh : 1. Damkar Kota Blitar 2. BPBD Kota Blitar 3. Satpol PP Kota Blitar 4. Koramil Sukorejo 5. Polsek Sukorejo 6. Agen Informasi Bencana Jatim wilayah Kota Blitar1	SELESAI	 



Tgl Kejadian	Jenis Kejadian	Lokasi	Kronologi	Jumlah			Penanganan & Unsur Yang Terlibat	Tindak Lanjut	Dokumentasi
				Korban	Kerusakan	Kerugian			
Jumat, 11 Agustus 2023 Pukul 19.39 WIB	Kebakaran	Jl. Widuri No.4, Kel. Karangsari, Kec. Sukorejo, Kota Blitar CV. Bumi Indah	Jam oper piket sore ke malam, petugas menemukan kepulan asap	NIHIL	Area gudang kurang lebih 2500m ² , area terbakar yakni gudang eggtray terbakar berisikan : 1. bahan baku eggtray 2. eggtray siap pakai 3. BBM, dan 4. Mess karyawan	Diperkirakan mencapai milyaran	Pemadaman dan assesment dilakukan oleh: 1. BPBD Kota Blitar 2. Agen Informasi Bencana wilayah Kota Blitar 3. PMI Kota Blitar 4. Damkar Kota Blitar 5. Polres Blitar Kota 6. Kodim 0808 7. Satpol PP 8. Dishub 9. Perangkat Wil Kel. Karangsari 10. Perangkat Wil Kec. Sukorejo 11. DLH Kota Blitar 12. Kesbangpol 13. PLN 14. TAGANA		   



Tgl Kejadian	Jenis Kejadian	Lokasi	Jumlah			Penanganan & Unsur Yang Terlibat	Tindak Lanjut	Dokumentasi
			Korban	Kerusakan	Kerugian			
Kamis, 14 September 2023	Kekeringan	Laporan sumur kering akibat musim kering panjang. Pelapor: Lapas IIB	NIHIL	NIHIL	Debit air buffer di sumur lapas mengalami penurunan	Assessment oleh BPBD Kota Blitar	Memberikan rekomendasi untuk menghubungi PDAM Tirta untuk melakukan suntik sumur dikarenakan instansi milik Kementrian	-



Tgl Kejadian	Jenis Kejadian	Lokasi	Kronologi	Jumlah			Penanganan & Unsur Yang Terlibat	Tindak Lanjut	Dokumentasi
				Korban	Kerusakan	Kerugian			
Senin, 16 Oktober 2023	Kebakaran Pabrik Bubut Kayu	Jl. Sawunggaling No.6, RT/RW 04/05. Kel. Sentul, Kec. Kepanjenkidul	Diduga akibat konsleting listrik	NIHIL	Kerusakan pada lokasi bubut kerajinan	1. Produksi bubut kerajinan terhambat 2. Kerugian material ± Rp10.000.000,-	Pemadaman oleh Damkar Kota Blitar	SELESAI	 

Tgl Kejadian	Jenis Kejadian	Lokasi	Kronologi	Jumlah			Penanganan & Unsur Yang Terlibat	Tindak Lanjut	Dokumentasi
				Korban	Kerusakan	Kerugian			
Jumat, 17/11/2023	Kekeringan	1) Lingk. Jatimalang Kel. Sentul, Kec. Kepanjenkidul 1) RT. 01, 02, 03 / RW. 09 2) RT. 02, 03, 04 / RW.07 3) RT.01 / RW.08 4) Fasum Musholla 2) Kel. Ngadirejo, Kec. Kepanjenkidul 1) RT. 01, 02 / RW 03 2) RT. 03 / RW. 01 3) Kel. Gedog, Kec. Sananwetan 1) RT. 01, 02, 03 / RW 11 2) RT. 01, 02, 03 / RW. 12 3) RT. 02 / RW. 06 4) RT.03 / RW. 05 5) Fasum Musholla 4) Kel. Tanjungsari 1) RT. 03 / RW . 03	Berdasarkan assessment lanjutan dan laporan warga setempat masih dibutuhkan bantuan suplai air bersih untuk kebutuhan sehari - hari	186 KK (693 jiwa) + 3 Fasum Musholla	NIHIL	Kekurangan pasokan air bersih	Assessment dan Distribusi Air Bersih oleh: 1. BPBD Kota Blitar 2. Agisena BPBD Jatim Wil. Kota Blitar 3. Damkar Kota Blitar 4. DLH Kota Blitar Menggunakan: 1. 1 Truck tangki air bersih kapasitas 4000 liter 2. 1 Truck tangki DLH kapasitas 5.000 liter 3. 5 tandon ukuran per @1200 liter 4. 15 Embung buatan kapasitas ±2000 liter Air yang di distribusikan sebanyak ±26.000 liter dengan mekanisme distribusi langsung, tandon <i>standby</i> , dan embung buatan	Koordinasi lanjut bersama Damkar dan DLH Kota Blitar untuk bantuan kendaraan dan suplai air berkelanjutan	  

Tgl Kejadian	Jenis Kejadian	Lokasi	Kronologi	Jumlah			Penanganan & Unsur Yang Terlibat	Tindak Lanjut	Dokumentasi
				Korban	Kerusakan	Kerugian			
Kamis, 7/12/2023	Kekeringan	1) Lingk. Jatimalang Kel. Sentul, Kec. Kepanjenkidul 1. RT. 01, 02, 03 / RW. 09 2. RT. 01, 02, 03, 04 / RW.07 3. RT.01, 02, 03 / RW.08 4. Fasum Musholla 2) Kel. Ngadirejo, Kec. Kepanjenkidul 1. RT. 01, 02 / RW 03 2. RT. 03 / RW. 01 3. RT. 01 / RW. 05 3) Kel. Gedog, Kec. Sananwetan 1. RT. 01, 02, 03 / RW 11 2. RT. 01, 02, 03 / RW. 12 3. RT. 02 / RW. 06 4. RT.03 / RW. 05 5. RT. 01 / RW. 03 6. Fasum Musholla 4) Kel. Tanjungsari 1. RT. 03 / RW. 03 2. RT. 01, 03 / RW 05 3. RT. 02 / RW. 04 5) .Kel. Tanggung 1. RT. 02 / RW. 05 2. RT. 01 / RW. 06	Berdasarkan assessment lanjutan dan laporan warga setempat masih dibutuhkan bantuan suplai air bersih untuk kebutuhan sehari - hari	300 KK (1150 jiwa) + 4 Fasum Musholla	NIHIL	Kekurangan pasokan air bersih	Assessment dan Distribusi Air Bersih oleh: 1. BPBD Kota Blitar 2. Agisena BPBD Jatim Wil. Kota Blitar 3. Damkar Kota Blitar 4. PMI Kota Blitar Menggunakan: 1. 1 Truck tangki air bersih kapasitas 4000 liter 2. 1 Truck Tangki PMI kapasitas 5.000 liter 3. 6 tandon ukuran per @1200 liter 4. 20 Embung buatan kapasitas ±2000 liter Air yang di distribusikan sebanyak ±27.000 liter dengan mekanisme distribusi langsung, tandon <i>standby</i> , dan embung buatan	Koordinasi lanjut bersama Damkar dan PMI Kota Blitar untuk bantuan kendaraan dan suplai air berkelanjutan	  

Kejadian	Kekeringan
Tempat	Kecamatan Sukorejo 1. Pakunden 2. Tanjungsari Kecamatan Kepanjenkidul 1. Tanggung 2. Ngadirejo 3. Sentul Kecamatan Sananwetan 1. Gedog
Tanggal	2 November 2023 – 28 Desember 2023
Deskripsi	Musim kemarau panjang yang terjadi di Kota Blitar menyebabkan beberapa wilayah mengalami krisis air. Sehingga BPBD Kota Blitar beserta OPD terkait melakukan dropping air ke beberapa wilayah tersebut guna membantu warga memenuhi kebutuhan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.
Keterangan	Ketetapan Darurat Kekeringan 1. Pernyataan Darurat Bencana Nomor 300.2.1/4313/410.205.3/2023 2. Keputusan Walikota Blitar 188/305/HK/410.020.3/2023 Tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Kekeringan di Kota Blitar 3. Keputusan Walikota Blitar 188/320/HK/410.020.3/2023 Tentang Perpanjangan Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Kekeringan di Kota Blitar 4. Keputusan Walikota Blitar 188/331/HK/410.020.3/2023 Tentang Perpanjangan Penetapan Kedua Status Keadaan Darurat Bencana Kekeringan di Kota Blitar Jumlah debit air 2.797.000 L air bersih

B. Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar didukung dengan dana yang cukup memadai. Pada tahun 2023 jumlah anggaran belanja terperinci secara garis besar sebagai berikut:

- | | | |
|------------------------------|-----------------|--------------------------|
| 1 | Belanja Operasi | : Rp. 4.158.833.114 |
| 2 | Belanja Modal | : Rp. <u>462.047.580</u> |
| Jumlah Belanja Daerah | | Rp. 4.620.880.694 |

Tabel 3.11

Realisasi Anggaran berdasarkan Jenis Belanja

No.	Jenis Belanja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Belanja Operasi	4.158.833.114	4.049.059.652	97,36
2.	Belanja Modal	462.047.580	457.094.800	98,93
	J U M L A H	4.620.880.694	4.506.154.452	97,52

Dari jumlah anggaran **Rp 4.620.880.694** sampai dengan 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar **Rp 4.506.154.452** dengan capaian **97,52%** Adapun khusus untuk anggaran dan realisasi belanja langsung program/kegiatan tahun 2023 tersebut dipaparkan melalui Tabel 3.9 di bawah ini:

Tabel 3.12

Realisasi Anggaran untuk Setiap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023

No.	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB-KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.541.282.961	1.512.262.372	98,12
1.1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	403.018.130	397.979.900	98,75

1.1.1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Bencana)	403.018.130	397.979.900	98,75
1.2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	581.217.520	574.213.047	98,79
1.2.1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	86.975.524	85.488.050	98,29
1.2.2	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	351.453.023	349.928.047	99,57
1.2.3	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	142.788.973	138.796.950	97,20
1.3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	361.957.653	346.633.525	95,77
1.3.1	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	361.957.653	346.633.525	95,77
1.4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	195.089.658	193.435.900	99,15
1.4.1	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	195.089.658	193.435.900	99,15
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.079.597.733	2.993.892.080	97,22
2.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.604.009	47.017.625	94,79
2.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.234.028	7.191.975	87,34

2.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	41.369.981	39.825.650	96,27
2.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.844.362.632	1.789.108.750	97,00
2.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.839.489.092	1.784.272.650	97,00
2.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	4.873.540	4.836.100	99,23
2.3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	163.354.000	162.531.200	99,50
2.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	96.684.075	96.258.500	99,56
2.3.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	66.669.925	66.272.700	99,40
2.4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	334.924.495	332.530.898	99,29
2.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.202.048	12.193.664	99,93
2.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.279.590	25.702.640	97,80
2.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.647.190	12.259.300	96,93
2.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.216.000	27.206.800	99,97
2.4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.398.571	31.175.139	99,29
2.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000	4.260.000	78,89
2.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	219.781.096	219.733.355	99,98
2.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	249.154.897	247.512.000	99,34

2.5.1	Pengadaan Mebel	24.478.714	22.950.000	93,75
2.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	224.676.183	224.562.000	99,95
2.6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	240.493.500	224.506.599	93,35
2.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.693.500	29.152.317	84,03
2.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	205.800.000	195.354.282	94,92
2.7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	197.704.200	190.685.008	96,45
2.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	179.479.000	172.593.508	96,16
2.7.2	Pemeliharaan Mebel	6.503.500	6.499.000	99,93
2.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.721.700	11.592.500	98,90
JUMLAH		4.620.880.694	4.506.154.452	97,52

1. Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Pembangunan Tahun 2023

Alokasi anggaran belanja per sasaran pembangunan yang dikelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar pada tahun 2023 dapat digambarkan melalui Tabel 3.10 sebagai berikut:

Tabel 3.13
Alokasi Anggaran Belanja Per Sasaran Pembangunan Tahun 2023

No	Sasaran		Anggaran	
	Uraian	Indikator	Rp	%
1	Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menghadapi Bencana	Indeks Kapasitas Daerah	1.541.282.961	33,35
2	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	3.079.597.733	66,65
TOTAL			4.620.880.694	100

Total alokasi anggaran untuk kedua sasaran pembangunan adalah Rp **4.620.880.694** dengan rincian untuk sasaran pembangunan pertama : Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menghadapi Bencana dengan anggaran **Rp 1.541.282.961 atau 33,35%**. Sasaran kedua: Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar **Rp 3.079.597.733 atau 66,65%**.

2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

Adapun pencapaian kinerja dan anggaran belanja yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar pada tahun 2023 dapat disimak pada Tabel 3.11 sebagai berikut:

Tabel 3.14
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Belanja Tahun 2023

Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tujuan : Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Indeks ketahanan daerah	0,58	0,43	74,14			
Sasaran 1: Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana	Indeks kapasitas daerah	0,55	0,43	78,18	1.541.282.961	1.512.262.372	98,12
Program : Program penanggulangan bencana	1. Persentase SDM penanganan bencana yang terlatih	92 %	91,47 %	99,42	1.541.282.961	1.512.262.372	98,12

	2. Jumlah kelurahan Tangguh bencana kategori madya	2 kelurahan	2 kelurahan	100 %			
	3. Persentase kelengkapan sarana prasarana pendukung penengangan bencana	50 %	50 %	100 %			
	4. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100 %	100 %	100 %			
Sasaran 2: Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	80	83,70	104,62	3.079.597.733	2.993.892.080	97,22
Program : Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks kepuasan masyarakat	Baik (80)	Baik (86,45)	108,06	3.079.597.733	2.993.892.080	97,22

Pada Program Penanggulangan bencana persentase realisasi anggaran Sebesar 98,12% sedangkan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah realisasi anggaran Sebesar 97,22%

3.Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.15
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 = 4/5
1	Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menghadapi Bencana	Indeks Kapasitas Daerah	78,18	98,12	0,79
2	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	104,62	97,22	1,08

Faktor Penghambat tidak terpenuhinya efisiensi pada indeks kapasitas daerah yaitu :

1. Belum adanya kebijakan /regulasi/peraturan daerah yang mengatur tentang penanggulangan bencana
2. Kurang lengkapnya dokumen dan bukti dukung dari OPD terkait dalam pemenuhan dokumen pendukung Indeks Kapasitas Daerah (IKD)

Tindak Lanjut :

1. Pada Perubahan Anggaran tahun 2023 telah disusun NA dan Raperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan usulan tersebut sudah masuk di propem Perda dan pada Tahun Anggaran 2024 akan dilaksanakan pembahasan Perda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di DPRD
- 2 a. Melakukan sosialisasi dan rapat koordinasi bersama OPD terkait tentang pentingnya pemenuhan dokumen dan kelengkapan bukti dukung untuk pengisian IKD Tahun 2024
- b. Menyelenggarakan FGD agar secara simultan dan berkelanjutan meminta stakeholder menyisir Kembali hasil evaluasi tahun sebelumnya untuk ditingkatkan kinerja output masing-masing variabel dari setiap indikator

Dari tabel diatas diketahui bahwa dalam pencapaian indikator kinerja tahun 2023, indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah mempunyai tingkat efisiensi 1,08. Adapun Faktor Pendorongnya yaitu : Komitmen yang kuat mulai dari pimpinan sampai dengan pelaksana perangkat daerah untuk terus menumbuhkan budaya kinerja melalui penerapan SAKIP.

A. Prestasi / Penghargaan

- Partisipasi dan dukungan pada Diklat Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di SMP Negeri 9 Kota Blitar, SMP Negeri 6 Kota Blitar, SD Negeri Tanjungsari 1 Kota Blitar dan SD Katolik Santa Maria Kota Blitar
- Penerima penghargaan kategori bidang kemitraan dan distribusi logistik dan peralatan tingkat kabupaten/kota wilayah barat Indonesia oleh BNPB
- Penghargaan Atas Kolaborasi dan Strategi yang diberikan untuk masyarakat melalui layanan Nomor Tunggal Kegawatdaruratan Call Center 112
- Penghargaan atas Penerimaan Penghargaan Kategori Bidang Kemitraan dan Distribusi Logistik dan Peralatan Tingkat Kabupaten/Kota Wilayah Barat



BAB IV



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar pada tahun anggaran 2023 yang didasarkan pada akuntabilitas. LKjIP juga disusun karena perannya sebagai alat kendali, penilai kualitas kerja dan sebagai pendorong perwujudan *good governance*. Di lain pihak, LKjIP juga merupakan media pertanggungjawaban kepada publik yang dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan kinerja. Sebagaimana

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2023 dapat dikatakan baik walaupun masih dijumpai adanya kendala/hambatan di dalam pelaksanaannya, Namun, di dalam pelaksanaannya pada masa mendatang dirasa akan dapat ditingkatkan dan diharapkan memperoleh hasil yang lebih baik.

Hal ini dapat dilihat dari realisasi capaian dua indikator kinerja utama /sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2023

Sasaran 1. Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana

Target : 0,55 Realisasi : 0,43 Capaian kinerja : 78,18

Untuk mencapai target Indeks yang telah ditentukan, diperlukan adanya kebijakan/regulasi/peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana serta Kerjasama dengan OPD terkait tentang pentingnya pemenuhan dokumen dan kelengkapan bukti dukung untuk pengisian IKD.

Sasaran 2. Meningkatnya kinerja perangkat daerah

Target Nilai SAKIP perangkat Daerah 80 Realisasi : 83,70.

Capaian Kinerja : 104,62

Guna perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan menindaklanjuti dan memanfaatkan hasil evaluasi dari Inspektorat Daerah.

B. Langkah Perbaikan

Langkah perbaikan yang akan dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain :

- a. Meningkatkan fungsi koordinatif BPBD Kota Blitar dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk merangkul semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana, baik di internal pemerintah maupun lembaga-lembaga terkait kebencanaan, swasta dan masyarakat;
- b. Menyusun kebijakan/regulasi/peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Sebagaimana dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1

**Rencana Tindak Lanjut LKjIP Badan Penanggulangan Daerah Kota
Blitar Tahun 2023**

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (murni)	Tahun 2024 (perubahan)	Tahun 2025
1.	Meningkatkan fungsi koordinatif BPBD Kota Blitar dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk merangkul	Penguatan kelembagaan dalam penanggulangan bencana	-Program penanggulan Bencana -Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggul	√	√	√

	semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana, baik di internal pemerintah maupun lembaga-lembaga terkait kebencanaan, swasta dan masyarakat		angan Bencana -Sub Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulan Bencana			
2.	Menyusun kebijakan/regulasi/peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana	Menyusun Perda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	-Program penanggulan Bencana -Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulan Bencana -Sub Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulan Bencana	√	√	

Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan dalam LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar. Semoga dapat memberikan kejelasan terhadap gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar sepanjang tahun anggaran 2023.

Blitar, Februari 2024
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Blitar





bpbd.blitar kota.go.id



bpbd_kotablitar



Pusdalops pb Blikot



bpbd_kotablitar



08113784157 / 08113184157

A blue scroll graphic with a dark blue outline and a light blue fill. The scroll is unrolled, showing the word "LAMPIRAN" in a bold, dark blue, serif font. The scroll has a small circular detail at the top right corner and a vertical strip on the left side.

LAMPIRAN

**MATRIKS RENCANA STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BLITAR
TAHUN 2021 – 2026**

VISI : Kota Blitar KEREN, Unggul, Makmur, Bermartabat

MISI : Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan

TUJUAN					SASARAN					CARA MENCAIPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
			2020	2023				2020	2023			
Tujuan Misi ke-4 Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Indeks ketahanan daerah	Nilai Indeks berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh BNPB	NA	0,58	Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana	Indeks kapasitas daerah	Nilai Indeks berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh BNPB	NA	0,55	Peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana	1. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan dalam penanggulangan bencana 2. Peningkatan kelurahan Tangguh bencana 3. Peningkatan sarana prasarana pendukung penanganan bencana 4. Optimalisasi koordinasi penanganan bencana 5. Pemenuhan prasyarat ketahanan daerah	

Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP BPBD yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah	A	A (80)	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP BPBD yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah	A	A (80)	Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	Menindaklanjuti dan memanfaatkan hasil evaluasi dari Inspektorat Daerah.	
--	------------------------------------	---	---	--------	--	------------------------------------	--	---	--------	---	--	--

Blitar, Februari 2024
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kota Blitar



MATRIKS RENCANA STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BLITAR
TAHUN 2021 – 2026

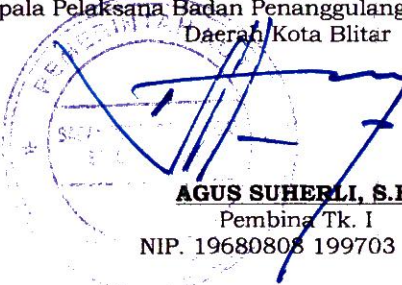
VISI : Kota Blitar KEREN, Unggul, Makmur, Bermartabat

MISI : Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan

TUJUAN										SASARAN										CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDI SI AWAL		TARGET					URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDI SI AWAL		TARGET					STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Indeks ketahanan daerah	Nilai Indeks berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh BNPB	NA	NA	0,56	0,58	0,60	0,62	0,65	Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana	Indeks kapasitas daerah	Nilai Indeks berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh BNPB	NA	NA	0,53	0,55	0,57	0,59	0,61	Peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana	1. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan dalam penanggulangan bencana 2. Peningkatan kelurahan Tangguh bencana 3. Peningkatan sarana prasarana pendukung penanganan bencana 4. Optimalisasi koordinasi penanganan bencana 5. Pemenuhan prasyarat ketahanan daerah	

Meningkat nya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP BPBD yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah	A	A	A (80)	A (80)	A (83,70)	A (83,71)	A (83,72)	Meningkat nya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP BPBD yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah	A	A	A (80)	A (80)	A (83,70)	A (83,71)	A (83,72)	Peningka tan Kinerja PD	Menindaklanjuti dan memanfaatkan hasil evaluasi dari Inspektorat Daerah.	
--	------------------------------------	---	---	---	--------	--------	-----------	-----------	-----------	---	------------------------------------	---	---	---	--------	--------	-----------	-----------	-----------	----------------------------------	---	--

Blitar, Februari 2024
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah/Kota Blitar



AGUS SUHERLI, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19680808 199703 1 006

RENCANA KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BLITAR

TUJUAN : Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana
 INDIKATOR : Indeks Ketahanan Daerah

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana	Indeks kapasitas daerah	0,55	Program penanggulangan bencana	1. Persentase SDM penanganan bencana yang terlatih 2. Jumlah kelurahan Tangguh bencana kategori madya 3. Persentase kelengkapan sarana prasarana pendukung penanganan bencana 4. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	92 % 2 kel 50 % 100 %	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Persentase Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 % 100 %	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (per jenis bencana) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten / Kota (per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di Kawasan tempat tinggalnya Jumlah warga negara dan aparaturnya yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Jumlah dokumen hasil pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten / Kota	950 orang 90 orang 12 dokumen	403.018.130 86.975.524 351.453.023

							Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	21 kawasan	142.788.973
										Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	50 orang	361.957.653
							Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase dokumen Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang tersusun	100 %	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana kabupaten/kota	Jumlah dokumen kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana	2 dokumen	195.089.658
2	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (80)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik (80)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	12 dokumen	8.234.028
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20 laporan	41.369.981
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 org/bln	1.839.489.092
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	5 laporan	4.873.540
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 paket	96.684.075
										Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	25 orang	66.669.925

							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 paket	12.202.048
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 paket	26.279.590
										Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	3 paket	12.647.190
										Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 paket	27.216.000
										Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1 paket	31.398.571
										Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	24 dokumen	5.400.000
										Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	219.781.096
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan BMD Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	4 unit	24.478.714
										Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	20 unit	224.676.183
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 laporan	34.693.500

									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	13 laporan	205.800.000
									Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	
									Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	11 unit	179.479.000
									Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	20 unit	6.503.500
									Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	37 unit	11.721.700

Blitar, Februari 2024
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kota Blitar


AGUS SUHERLI, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19680808 199703 1 006

PENGUKURAN KINERJA

Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun : 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana	Indeks kapasitas daerah	Nilai Indeks berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh BNPB	0,55	0,43	78,18	1. Belum adanya kebijakan / regulasi / peraturan daerah yang mengatur tentang penanggulangan bencana 2. Kurang lengkapnya dokumen dan bukti dukung dari OPD terkait dalam pemenuhan dokumen pendukung Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	Program Penanggulangan Bencana	1.541.282.961	1.512.262.372	98,12	
2	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP BPBD yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah	A (80)	A (83,70)	104,62		Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	3.079.597.733	2.993.892.080	97,22	

Blitar, Februari 2024
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA BLITAR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

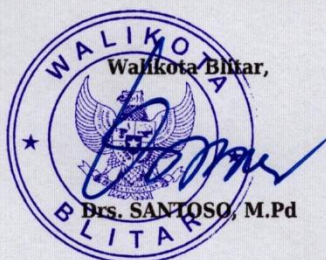
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

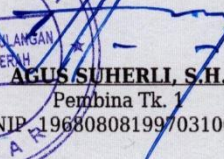
Nama : **AGUS SUHERLI, S.H.**
Jabatan : **Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. SANTOSO, M.Pd**
Jabatan : **Walikota Blitar**
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran pekerjaan ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Blitar, 20 Oktober 2023
**Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Blitar,**

AGUS SUHERLI, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196808081997031006

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA BLITAR**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menghadapi Bencana	Indeks Kapasitas Daerah	0.55(angka)
2	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80.00(nilai)

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1,541,282,961.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,079,597,733.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Total:		4,620,880,694.00	



Blitar, 20 Oktober 2023
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Blitar,



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BLITAR

NO	DAFTAR OUTLINE LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023	CHECK LIST		KETERANGAN
		Ada	Tidak	
1	Kata Pengantar	✓		
2	Executive Summary	✓		
3	Daftar Isi	✓		
4	BAB I PENDAHULUAN			
	A. Latar Belakang	✓		
	B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	✓		
	C. Maksud dan Tujuan	✓		
	D. Dasar Hukum	✓		
	E. Aspek-Aspek Strategis (yang menunjang pada tahun berkenaan)	✓		
	F. Isu-Isu Strategis (pada tahun berkenaan)	✓		
5	BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA (uraian singkat berupa gambar/tabel/ diagram dan sedikit penjelasan)			
	A. Rencana Strategis 2021 - 2026 (uraian singkat peran PD dalam pencapaian Visi dan Misi Kota Blitar)	✓		
	B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (yang terakhir)	✓		
6	BAB III AKUNTABILITAS KINERJA (uraian singkat berupa gambar/tabel/ diagram dan sedikit penjelasan) minimal menyajikan capaian atas Perjanjian Kinerja pada BAB II			
	A. Pengukuran Capaian Kinerja/Sasaran	✓		
	1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023 (di dalamnya ada unsur pendukung, penghambat dan tindak lanjut perbaikannya)	✓		
	2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 - 2023	✓		
	3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir Periode Renstra	✓		
	4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional (Target SPM), jika tidak ada maka bisa disandingkan dengan capaian Kabupaten/Kota lain atau capaian Provinsi Jawa Timur	✓		
	B. Akuntabilitas Keuangan (Cost per Outcome)			
	1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan	✓		
	2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran	✓		
	3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	✓		perlu ditambahkan uraian faktor pendorong dan penghambat terkait efisiensi
	C. Prestasi/Penghargaan			
7	BAB IV PENUTUP (uraian singkat berupa gambar/tabel/ diagram dan sedikit penjelasan)	✓		
	A. Kesimpulan (capaian kinerja tahun 2023)	✓		
	B. Saran (tindak lanjut perbaikan kedepan dari permasalahan yang ada)	✓		
8	LAMPIRAN - LAMPIRAN			
	A. Rencana Strategis PD Tahun 2021 - 2026 berupa tabel sebagaimana terlampir	✓		
	B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 berupa tabel sebagaimana terlampir	✓		

NO	DAFTAR OUTLINE LAPORAN KINERJA INSTANSI	CHECK LIST		KETERANGAN
	C. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 berupa tabel sebagaimana terlampir	✓		
	D. Pengukuran Kinerja Tahun 2023 berupa tabel sebagaimana terlampir	✓		



PEMERINTAH KOTA BLITAR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Merdeka No. 105 Telepon 0342-801171
Website : <http://setda.blitarkota.go.id> E mail: organisasi@blitarkota.go.id

BLITAR-66117

BERITA ACARA
NOMOR : 069.5/ 07 /410.030.2/2024

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : YULIANI INDARYANTI, S.Pd.
NIP : 197407112006042017
Pangkat / Golongan : Penata Tk.I / III d
Jabatan : Perencana Ahli Muda Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Blitar

yang selanjutnya disebut pihak PERTAMA (Peserta Desk LKj IP)

2. Nama : YUNITA RAHMAWATI, S.T.
NIP : 198606132015012001
Pangkat / Golongan : Penata Muda Tk. I / III b
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Pertama Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Blitar

yang selanjutnya disebut pihak KEDUA (Petugas Desk LKj IP)

telah melaksanakan desk atas kebenaran data dan informasi yang disajikan pada dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2023.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Blitar, 21 Februari 2024

PIHAK KEDUA

Analisis Kebijakan Ahli Pertama Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Blitar,

YUNITA RAHMAWATI, S.T.
Penata Muda Tk. I
NIP. 198606132015012001

PIHAK PERTAMA

Perencana Ahli Muda
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Blitar,

YULIANI INDARYANTI, S.Pd.
Penata Tk.I
NIP. 197407112006042017

Mengetahui / Mengesahkan
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Blitar,

AGUS SUHERLI, SH.
Pembina Tk.I
NIP. 196808081997031006

TANDA TERIMA

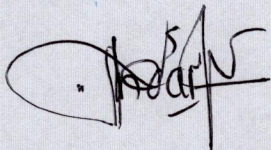
Telah terima Dokumen dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar :

Kepada : Bagian Organisasi Setda Kota Blitar

Dokumen : Soffcopy Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2023

Blitar, 29 Februari 2024

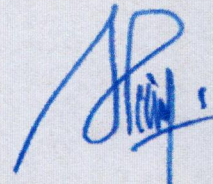
Yang Mengirim



YULIANI INDARYANTI, S.Pd.

NIP. 197407112006042017

Yang Menerima



NIKEN NIULANSARI, S.AP.

NIP. 198210252010012009